

# POLITIK GENDER & KETERWAKILAN PEREMPUAN

*Dalam Pilkada Provinsi Lampung*



## **PENELITIAN KELOMPOK**

DR. MUHADAM LABOLO, M.SI  
PROF. DR. H. M. ARIES DJAENURI, MA  
TEGUH ILHAM, SSTP, MA  
HASNA AZMI FADHILAH, SSTP, M.RES



**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
2019**

## **PENELITIAN KELOMPOK**

### **POLITIK GENDER DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PILKADA PROVINSI LAMPUNG**



#### **Tim Pengusul:**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>1. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si</b>      | <b>Ketua</b>   |
| NIDN : 3405087201                            |                |
| No. Sertifikasi :12192000108869              |                |
| <b>2. Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA</b> | <b>Anggota</b> |
| <b>3. Teguh Ilham, SSTP, MA</b>              | <b>Anggota</b> |
| <b>4. Hasna Azmi Fadhilah, SSTP, M. Res</b>  | <b>Anggota</b> |

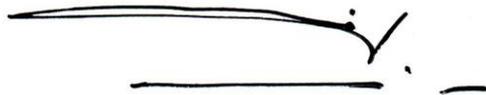
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung**
2. Bidang Penelitian : **Politik Pemerintahan**
3. Ketua
  - a. Nama Lengkap : Dr. Muhadam Labolo, Drs., M.Si.
  - b. NIP/NIDN : 197208051993031006/3408057201
  - c. Disiplin Ilmu : Pemerintahan
  - d. Pangkat Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - f. Program Studi : Politik Indonesia Terapan
  - g. Fakultas : Politik Pemerintahan
  - h. Tlp/Email : 081343207177/muhadamlabolo@gmail.com
4. Jumlah Anggota : 3 (tiga) orang
  - a. Nama Anggota I : Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA
  - b. Nama Anggota II : Teguh Ilham, SSTP, MA
  - c. Nama Anggota III : Hasna Azmi Fadhilah, SSTP, M. Res
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
6. Jumlah Biaya :
7. Publikasi : Dipublikasikan

Jatinangor, Oktober 2019

Ketua,



**Dr. Muhadam Labolo, Drs., M.Si**

NIP. 19720805 199303 1 006

Mengesahkan,  
Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategis Pemerintahan

**Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.**

NIP. 19540119 197707 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN SUPERVISI**

**TELAH DIKOREKSI:**

**JATINANGOR, OKTOBER 2019**

**SUPERVISOR,**

**Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.Si**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah memudahkan jalan dalam menyusun proposal penelitian hingga pada akhirnya proposal penelitian ini siap untuk direviu dan diberi masukan yang konstruktif. Pemilihan tema terkait politik gender pada kontestasi pemilihan gubernur Lampung didasarkan pada pertimbangan menguatnya politik gender di Provinsi Lampung akibat pencalonan dari Chusnunia Chalim sebagai salah satu calon wakil gubernur, terutama dengan banyaknya pemberitaan negatif dan serangan-serangan personal yang mengarah kepadanya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada penguatan identitas perempuan dalam kepala daerah dan dampak kinerja pemerintahan yang memiliki pemimpin perempuan.

Selain itu, kondisi diskriminatif yang dihadapi oleh perempuan teridentifikasi dari beberapa faktor seperti regulasi yang diskriminatif dan fakta bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam politik yang masih sangat rendah. Ini terlihat dari presentase perempuan yang mencalonkan diri pada pemilu pada tahun lalu yang hanya sebanyak kurang lebih tujuh persen.

Penelitian yang akan kami selenggarakan ini menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh jenis penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu peristiwa melalui pengamatan langsung terhadap para pelaku dan lingkungan yang mempengaruhinya, penelitian ini akan kami selenggarakan dengan cara wawancara langsung terhadap informan yang relevan, menghimpun data dan laporan dari pihak-pihak yang terkait, dan menganalisis pemberitaan baik melalui media daring maupun cetak terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Karena alasan geografis, maka penelitian akan dilakukan pada dua wilayah dimana pasangan terpilih

mendapatkan suara terendah dan di wilayah dimana pasangan terpilih mendapatkan suara tertinggi.

Penelitian ini merupakan bagian dari program Penelitian Kelompok tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengkajian Stratejik Pemerintahan (LRPSP) IPDN. Akhirnya, berkat dukungan dari lembaga ini, penelitian yang berjudul **POLITIK GENDER DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PILKADA PROVINSI LAMPUNG** ini dapat diselesaikan. Semoga penelitian ini kelak tidak hanya memberikan dampak terhadap pengembangan keilmuan di IPDN, akan tetapi juga mampu sebagai bahan masukan yang memperkaya kajian tentang politik lokal, khususnya terkait politik gender dalam pemilukada sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	16
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	16
1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	16
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1 Tinjauan Teoritik Terkait .....	18
2.1.1 Politik Gender.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Keterwakilan Politik Perempuan .....	21
BAB III METODE KAJIAN.....	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.1 Operasionalisasi Konsep Penelitian.....	25
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.3 Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan .....	26
3.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	26
BAB IV PEMBAHASAN .....	29
4.1 Gambaran Umum .....	28
4.2 Politik Gender di Lampung .....	43
4.3 Strategi Politik dalam Menghadapi Isu Keperempuanan.....	47
BAB V KESIMPULAN .....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat sedunia, Indonesia menjadi tempat tinggal bagi 266,79 juta jiwa manusia. Dari angka tersebut, populasi perempuan mencapai 131,47 juta. Meski dari segi kuantitas, proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Indonesia hampir berimbang, namun jika ditilik dari aspek kesejahteraan dan aksesibilitas, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan masalah kesenjangan gender. Dari laporan yang dirilis oleh *the World Economic Forum/WEF* tahun lalu, indeks kesenjangan gender di Indonesia berada di peringkat 85, jauh tertinggal dari Filipina yang berada di peringkat 8 dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara dalam ranking sepuluh besar.<sup>1</sup>

Indeks kesenjangan gender dari WEF sendiri mempertimbangkan empat faktor utama, yakni: partisipasi dan kesempatan pada aspek ekonomi, pencapaian tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan partisipasi politik. Dari keempat bidang tersebut, kesenjangan dalam bidang pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena mendapatkan skor terendah. Walaupun, jika dilihat faktanya Indonesia sempat dipuji karena tingkat melek aksaranya adalah salah satu yang tertinggi di Asia.<sup>2</sup> Namun indikator ini tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Ketertinggalan perempuan dari laki-laki di Indonesia ternyata merupakan problematika yang kompleks. Selain dipengaruhi oleh banyaknya anak perempuan putus sekolah di tingkat dasar karena lebih

---

<sup>1</sup> "The Global Gender Gap Report 2018", the World Economic Forum, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2018.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf), (30 Januari 2019).

<sup>2</sup> "Bagaimana Skor Indonesia di Indeks Kesetaraan Gender 2018?", DW, <https://www.dw.com/id/bagaimana-skor-indonesia-di-indeks-kesetaraan-gender-2018/a-45552865>, (30 Januari 2019).

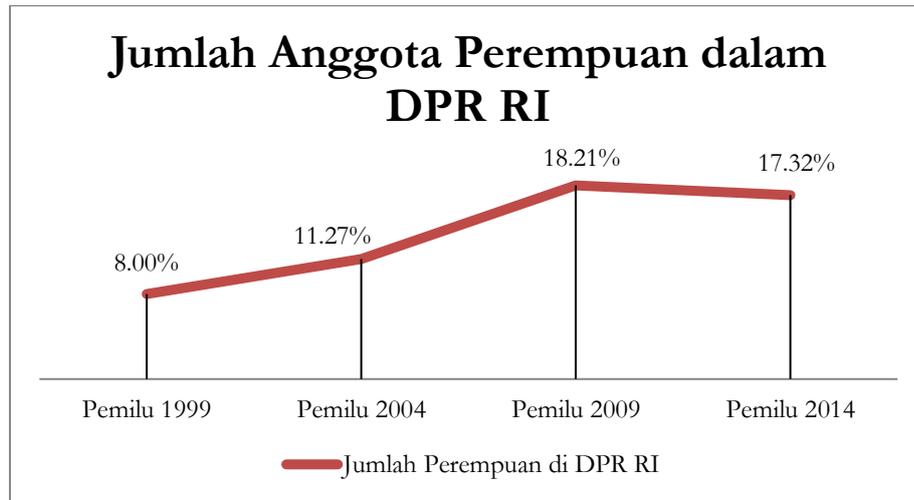
memilih untuk bekerja dan menikah dini, faktor lain yang memperlebar gap pendidikan adalah adanya stigma sosial yang kerap dilancarkan pada perempuan berpendidikan tinggi. Hal ini kemudian diperparah oleh banyaknya peraturan daerah baik di tingkat lokal maupun nasional sifatnya sangat diskriminatif terhadap perempuan. Data dari Komnas Perempuan pada akhir 2018 lalu menyatakan bahwa terdapat 421 kebijakan yang membatasi aktivitas perempuan, termasuk 56% peraturan daerah. Sisanya berbentuk surat edaran keputusan kepala daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.<sup>3</sup>

Banyaknya regulasi diskriminatif ini tentu tidak lepas dari rendahnya kuantitas pengambil keputusan yang berasal dari gender yang sama. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa partisipasi perempuan Indonesia di bidang politik masih sangat rendah. Dalam kontestasi kepala daerah tahun lalu, persentase perempuan yang mengajukan diri menjadi pemimpin hanya mencapai 6,9%. Angka ini turun 0,3% dari persentase dalam pilkada serentak pada tahun 2015. Sedangkan dari kuota minimum kebijakan afirmasi yang ada, yakni 30%, persentase perempuan yang menduduki kursi legislatif dan eksekutif di tingkat nasional justru tidak banyak mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Berikut grafiknya yang diolah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

<sup>3</sup> Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", <https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>, (30 Januari 2019).

**Figur 1.1**



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota legislatif perempuan memang meningkat pada tahun 2004 dan 2009, walaupun kemudian menurun tipis pada periode berikutnya. Hanya saja, peningkatan tersebut masih di bawah minimum kuota 30% dari *affirmative action* yang disepakati.

Di tingkat daerah, gambaran persoalan partisipasi perempuan di ranah politik juga tidak jauh berbeda. Salah satu contohnya di Provinsi Sumatera Selatan. Bila dilihat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota dewan perempuan hanya berjumlah 13 dari 75 total keseluruhan, atau sekitar 17,23%. Hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi pemilih perempuan yang justru cukup tinggi, yakni 78%.<sup>4</sup> Menilik fenomena tersebut, perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa ada baiknya pemerintah, partai politik, dan KPU bekerja sama untuk memberikan sosialisasi dan kaderisasi khusus bagi kaum perempuan agar dapat mendorong termaksimalkannya peran mereka di ranah politik. Terlebih, banyak kebijakan publik yang bersinggungan erat

<sup>4</sup> "Partisipasi Politik Perempuan Rendah", <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4898/Partisipasi-Politik-Perempuan-Rendah>, (31 Januari 2019).

dengan hak-hak dasar keperempuanan. Sehingga peran perempuan ke depannya diharapkan jauh lebih luas dan dapat kemudian memberi pengaruh lebih besar terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah maupun nasional.

Selain Sumatera Selatan, Provinsi Lampung juga menghadapi problematika yang hampir sama. Bedanya, pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak tahun lalu, memberikan hasil cukup memuaskan bagi kandidat perempuan di daerah ini. Di Kabupaten Tanggamus, calon bupati perempuan mendapatkan suara tertinggi, begitu pula wakil calon wakil gubernur yang berlaga di tingkat provinsi. Angin segar ini seolah menutup tingkat keterwakilan perempuan di Lampung yang masih jauh dari kuota minimum.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengamanatkan bahwa representasi perempuan harus memenuhi kuota 30%, baik KPU provinsi maupun kabupaten/kota sudah mendorong para perempuan agar lolos menjadi anggota legislatif. Sayangnya, statistik di lapangan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun keterwakilan perempuan di legislatif hanya berkisar 10%. Lebih detailnya, dari 85 kursi DPRD Lampung, hanya terdapat 9 orang perempuan.<sup>5</sup>

Rendahnya kuantitas perwakilan perempuan baik di parlemen dan di tingkat eksekutif, walaupun sudah diterapkan kebijakan afirmasi merupakan tantangan tersendiri dari bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya stigma dan budaya patriarki yang masih dominan di negara kita.<sup>6</sup> Bahkan dalam pencalonan dan kampanye para kandidat perempuan tidak jarang isu-isu personal yang tidak berkaitan

---

<sup>5</sup> Ana Yunita Pratiwi, "Perempuan dalam Politik", <http://www.lampost.co/berita-perempuan-dalam-politik.html>, (31 Januari 2019)

<sup>6</sup> Ana Maria G. D. dan M. A. Liza Q., "Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak", <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27052>, (31 Januari 2019)

dengan program kerja serta visi misi malah justru lebih sering menjejal mereka daripada keberpihakan mereka terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan ibu-ibu dan perempuan lainnya.

Bias gender dalam politik ini juga ditemukan ketika calon wakil gubernur Lampung yang juga bupati Lampung Timur bernama lengkap Chusnunia Chalim berpartisipasi dalam kontestasi politik lima tahunan. Saat akan mendaftarkan diri menjadi kandidat wakil gubernur, status Chusnunia yang belum menikah dipersoalkan oleh publik.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, anak angkat yang Chusnunia rawat dan asuh pun ikut terseret ke ranah publik.<sup>8</sup> Bahkan kejelasan status anak yang diadopsi Chusnunia kemudian menjadi bahan demonstrasi di Lampung Timur. Padahal mempersoalkan status anak yang diasuh seseorang merupakan tindakan pelanggaran privasi, terlebih ketika menjadikannya sebagai materi untuk memprotes kinerja Chusnunia, yang waktu itu masih menduduki jabatan sebagai Bupati Lampung Timur.

Dalam politik sendiri, serangan kampanye yang bernada negatif menjurus personal sudah sangat umum terjadi di negara-negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat. Di Indonesia, kampanye menyerang lawan dengan mengangkat isu-isu personal juga bukan merupakan hal yang aneh, terutama beberapa tahun terakhir ketika penggunaan media sosial semakin marak. Namun jika dilihat dari segi dampak, efek kampanye negatif sendiri ternyata berbeda, tergantung dari gender kandidat. Penelitian dari Cassese dan Holman menyimpulkan bahwa kandidat

---

<sup>7</sup> "Status Gadis Chusnunia Jadi Bahasan Netizen", <https://be1lampung.com/headlines/status-gadis-nunik-daftar-pilgub-jadi-bahasan-nitzen>, (31 Januari 2019).

<sup>8</sup> "Ketua Komnas Anak: Jangan Eksploitasi Anak untuk Mendemo Bupati Lampung Timur", <http://lampung.tribunnews.com/2017/08/08/ketua-komnas-anak-jangan-eksploitasi-anak-untuk-mendemo-bupati-lampung-timur>, (01 Februari 2019).

perempuan jauh dirugikan dan mengalami penurunan elektabilitas bila mereka diserang oleh isu-isu sensitif personal.<sup>9</sup>

Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, dalam kasus pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung, dampak kampanye negatif yang menyerang Chusnunia justru bukan menjadi bumerang bagi dirinya. Rilis terakhir dari KPU, pasangan nomor urut satu ini malah kemudian dinyatakan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung terpilih.<sup>10</sup> Hasil tersebut seakan kontradiktif dengan banyaknya fakta umum yang membuktikan bahwa kandidat perempuan cenderung kehilangan suara ketika diserang secara personal.

Kemenangan Arinal-Chusnunia dalam mendulang mayoritas suara masyarakat Lampung juga menunjukkan bahwa publik tidak alergi terhadap kandidat perempuan dan hal ini menjadi pertanda positif dalam bidang kesetaraan gender. Meski keterpilihan Chusnunia menjadi berita baik dalam peningkatan partisipasi politik perempuan, pekerjaan rumah untuk meningkatkan representasi perempuan di ranah ini masih banyak. Salah satunya mendorong perempuan dari berbagai latar belakang untuk berperan serta dalam politik, tidak hanya dari golongan elit dinasti politik maupun pengusaha. Seperti yang dilaporkan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), latar belakang politisi perempuan sebagian besar masih berasal dari jejaring kekerabatan dan kader partai. Selain itu, keberadaan politisi perempuan yang ada justru tidak memiliki keberpihakan terhadap isu-isu perempuan. Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan bahwa dalam dua pilkada serentak terakhir, yakni tahun 2015 dan 2017, kandidat perempuan yang mengusung program kerja yang berpihak pada perempuan dan perlindungan anak

---

<sup>9</sup> Cassese, E.C. & Holman, Party and Gender Stereotypes in Campaign Attacks, *M.R. Polit Behav* (2018) 40: 785. <https://doi.org/10.1007/s11109-017-9423-7>.

<sup>10</sup> Antara, Pilkada Lampung, KPU Tetapkan Arinal-Nunik Gubernur dan Wagub, <https://nasional Tempo.co/read/1116286/pilkada-lampung-kpu-tetapkan-arinal-nunik-gubernur-dan-wagub>, (02 Februari 2019).

hanya separuh dari total calon. Angka ini semakin diperburuk oleh banyak kepala daerah perempuan yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi.<sup>11</sup>

Menilik catatan-catatan yang ditorehkan oleh politisi perempuan beberapa tahun terakhir, kemenangan Chusnunia dalam pilkada Provinsi Lampung menjadi kasus yang perlu dianalisis lebih mendalam. Terutama dengan banyaknya pemberitaan negatif dan serangan-serangan personal yang mengarah kepadanya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada penguatan identitas perempuan dalam kepala daerah<sup>12</sup> dan dampak kinerja pemerintahan yang memiliki pemimpin perempuan.<sup>13</sup>

Tidak hanya itu, dengan masih sedikitnya proporsi perempuan di ranah politik dan peningkatan frekuensi kampanye negatif terhadap kandidat perempuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi bagi kalangan perempuan yang akan terjun dalam ranah politik praktis.

---

<sup>11</sup> Ayomi Amindoni, "Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018 Naik, Keberpihakan pada Agenda dan Isu Perempuan masih Rendah", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445>, (02 Februari 2019).

<sup>12</sup> Gustiana A. Kambo, 2017, "Penguatan Identitas Perempuan dalam Kepala Daerah", *the Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin Vol. 3 No. 1*, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3807/pdf>.

<sup>13</sup> Agus R. P. dan Doddy Setiawan, 2017, "Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak terhadap Kinerja Pemerintahan?", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 8 No. 3 hal. 427-611*, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/759>.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana situasi politik gender dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana strategi pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam melawan stigma dan isu-isu negatif keperempuanan dalam pilkada tahun 2018 lalu?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana politik gender dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Ruang lingkup penelitian ini meliputi studi kasus di dua daerah, yakni wilayah dimana pasangan terpilih mendapatkan suara terendah dan di daerah dimana pasangan terpilih mendapatkan suara tertinggi, di Provinsi Lampung. Selain juga di KPU Provinsi Lampung yang notabene sebagai penyelenggara pilkada.

## **1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik gender dalam kontestasi kepala daerah di Provinsi Lampung; dan
2. Untuk memahami bagaimana strategi kandidat pemimpin perempuan dalam menangkal isu-isu misoginis dalam usaha memenangkan pilkada di Provinsi Lampung.

Sasaran dari penelitian ini adalah tersusunnya *lessons learned* yang dapat dikaji oleh berbagai pemangku kepentingan untuk selanjutnya dapat meningkatkan proporsi keterwakilan perempuan di ranah politik dan juga peningkatan kesadaran masyarakat akan penyeteraan gender. Sintesa penelitian ini diharapkan dapat dipresentasikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seminar internasional untuk diskusi pengembangan

kebijakan, dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional untuk pengembangan ilmu pemerintahan, studi pembangunan, dan studi kebijakan publik.

### **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoretis, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya dan melengkapi literatur ilmu politik, terutama dalam memetakan hubungan interaksional antar aktor kebijakan dalam pengarusutamaan gender dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang politik gender. Dari segi manfaat praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberi informasi tambahan dan bahkan dapat menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan berkaitan dengan kesetaraan gender di ranah politik.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teoritis

#### 2.1.1 Politik Gender

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang tidak berdiri sendiri. Ia juga bergantung kepada faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis (Rasyidin dan Aruni: 2019).<sup>14</sup> Gender berbeda dengan jenis kelamin dan ia dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dalam memaknai konsep gender, seringkali terjadi kekurangtepatan dalam menafsirkannya terutama dalam relasi upaya emansipasi perempuan. Kekurangtepatan ini terjadi akibat perbedaan perspektif dalam melihat gender, baik oleh publik ataupun para peneliti sendiri. Sebagai suatu fenomena sosial, ia bersifat relatif dan bergantung kepada konteks dan konstruksi sosial masyarakat tertentu (Rasyidin dan Aruni: 2019). Oakley (1972) menyatakan bahwa gender tidaklah dibedakan berdasarkan faktor biologis ataupun kodrat Ilahi. Gender menurutnya dibedakan atas perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan ilahiah melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama. Gerakan feminisme menggunakan kata gender sebagai penentangan terhadap *patriarchy* atau *sexism*. Sedangkan menurut *Women's Studies Encyclopedia* gender merupakan konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Anugrah: 2009).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rasyidin dan Fidhia Aruni. 2019. Gender Dan Politik: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.

<sup>15</sup> Astrid Anugrah (2009), Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 4.

Perempuan dan politik akhir-akhir ini seringkali memenuhi ruang diskusi publik dan menjadi slogan dari partai politik (Komariyah:2017).<sup>16</sup> Terutama pada negara-negara berkembang, kombinasi kedua kata tersebut sebelumnya merupakan hal yang agak sulit dibayangkan. Keadaan ini berangkat dari budaya yang menekankan kedudukan atau perannya wanita tidak bisa dilepaskan dari lingkungan keluarga, sementara di sisi lain, politik diasosiasikan dengan kekuasaan yang menjadi domain laki-laki. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat aktif dalam menjalankan fungsi perwakilan politik seringkali masih belum memadai dalam menghadapi ancaman diskriminasi dan marginalisasi (Susanti: 2011).<sup>17</sup> Berbagai penelitian yang telah dilakukan menggambarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam aktivitas politik seperti Cantor dan Bernay (1992) yang mengkaji bagaimana kiprah wanita Amerika Serikat dalam dunia politik yang mendapatkan hambatan sosial dan politik regulasi.<sup>18</sup> Selain itu, dalam konteks Indonesia, Utami (2001) melakukan penelitian tentang kiprah perempuan dalam politik di parlemen mengungkapkan adanya diskriminasi dalam hak angket dan kompromi politik. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut Utami (2001) mengidentifikasi penyebabnya, antara lain oleh budaya yang berkembang dimana perempuan dianggap hanya sebagai “*Konco Wingking*” yang berperan di belakang panggung politik saja.<sup>19</sup>

Menurut Partini (2012) hal ini terjadi dikarenakan oleh sistem patriakhat yang tidak memberikan kesempatan secara setara kepada perempuan dimana mereka dianggap sebagai saingan. Konsekuensinya, kesetaraan gender bagi perempuan terkait peran dan kedudukan

---

<sup>16</sup> Komariyah, Nur (2017) Gerakan Perempuan Partai Politik : Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan oleh Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>17</sup> L. Rintis Susanti, Perempuan dan Politik, Jurnal Studi Politik Vol'1 No.2 Tahun 2011, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

<sup>18</sup> Cantor, Dorothy dan Toni Bernay. 1992. Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka

<sup>19</sup> Utami, Tari Siwi. 2001. Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001. Yogyakarta : Gama Media

perempuan (*gender parity*) dalam politik menjadi terbatas. Dampak yang akan terjadi akibat ketidaksetaraan gender adalah tidak tersalurkannya aspirasi perempuan melalui saluran-saluran politik yang ada. Diskriminasi politik berbasis gender di Indonesia sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini semakin menguatkan apa yang dikatakan oleh Beauvoir (1993) bahwa perempuan cenderung diasosiasikan sebagai '*the second class*' yang mendapatkan pengabaian. Jika dilihat dari kronologis historis Indonesia, peta sejarah perpolitikan dan militer Indonesia cenderung bersifat androsentris yang menyebabkan perempuan semakin terpinggirkan sebagai '*the second sex*' (Adam:2007). Angin segar mulai datang pasca tumbangannya rezim Orde Baru. Aktivitas politik dan ruang diskusi perempuan di Indonesia mulai terbuka lebar seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru (Partini, 2004).<sup>20</sup> Berbagai macam organisasi perempuan dengan berbagai macam basis perjuangan mulai didirikan. Begitu juga tak ketinggalan partai politik mulai tertarik untuk menambahkan struktur khusus yang berbasis perempuan dalam organisasi ataupun sayap organisasinya. Sebagai contoh, Partai Golkar dengan sayap organisasinya Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Wanita Persatuan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki Perempuan Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki Perempuan Amanat Nasional, dan masih banyak lagi (Partini: 2012).

---

<sup>20</sup> Partini, 2004. 'Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah', Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol, 7, No 3, Maret 2004: 315-334

### 2.1.2 Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Representasi merujuk pada bagaimana seseorang, sebuah kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001).<sup>21</sup> Dalam gagasan Fiske (1987) persoalan utama representasi adalah bagaimana realitas tersebut ditampilkan.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan perempuan di ranah politik bagaimana realitas perpolitikan menunjukkan adanya sebuah dinamika (Partini: 2012).<sup>23</sup>

Beberapa studi terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik menarik untuk dipelajari. Beberapa di antaranya melihat bahwa bentuk kelembagaan memiliki pengaruh, seperti yang ditemukan oleh Smith, Reingold, dan Owens (2011) bahwa kemungkinan untuk terpilih bagi perempuan semakin meningkat pada saat 'prestise' institusi semakin rendah. Dalam konteks ini, mereka melihat bahwa tingkat keterpilihan perempuan sebagai walikota tinggi jika dipilih melalui lembaga representatif dibandingkan dipilih secara langsung.<sup>24</sup> Pada aspek lain, terdapat juga pandangan terkait pengaruh prestise, yang diukur pengaturan pemilihan, *district* (sistem daerah pemilihan) atau *at large* (dipilih oleh seluruh populasi pemilih tanpa pembagian dapil), bagi pemilihan perempuan untuk mengisi kursi dewan kota. Beberapa peneliti menemukan bahwa perempuan memiliki probabilitas lebih besar untuk dipilih jika menggunakan sistem distrik (Crowder-Meyer, Gadarian, dan Trounstone 2015),<sup>25</sup> sedangkan Smith, Reingold, dan Owens (2011) dan Bullock dan MacManus (1991) tidak menemukan korelasi antara probabilitas keterpilihan perempuan dengan sistem pemilihan. Dalam kajiannya masing-masing, Smith, Reingold dan Owens (2011) dan Trounstone dan Valdini (2008) tidak

---

<sup>21</sup> Eriyanto, 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS

<sup>22</sup> Fieske, John, 1987. Television Culture. London and New York: Routledge

<sup>23</sup> Partini. Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2 , November 2012

<sup>24</sup> Smith, Adrienne, Beth Reingold, and Michael Leo Owens. 2011. The political determinants of women's descriptive representation in cities. Political Research Quarterlyly 64:315-29.

<sup>25</sup> Crowder-Meyer, Melody. 2013. Gendered recruitment without trying: How local party recruiters affect women's representation. Politics & Gender 9:390-413.

menemukan korelasi faktor kelembagaan lain seperti gaji, lama masa jabatan, dan besar kursi dengan tinggi atau rendahnya tingkat keterwakilan perempuan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, tidak semua faktor kelembagaan berpengaruh sama kepada semua perempuan. Contohnya, dalam penelitian Trounstine dan Penelitian Valdini (2008) ditemukan bahwa pemilihan distrik ternyata mengurangi tingkat keterpilihan wanita kulit putih, berbanding terbalik dengan perempuan latin dan kulit hitam. Sedangkan Hardy-Fanta dkk (2016) menemukan bahwa perempuan kulit hitam memiliki tingkat keterpilihan lebih tinggi pada sistem distrik dibandingkan perempuan keturunan Asia dan Latin.<sup>26</sup> Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat persilangan antara faktor kelembagaan dengan latar belakang kandidat perempuan.

Konsep keterwakilan perempuan dalam politik tidaklah hanya dilihat dari kuantitas perempuan yang aktif dalam politik. Iskandar (2008) menyebutkan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis keterwakilan tersebut:

1. Keterwakilan ide/gagasan. Konsep ini dimaknai dengan asumsi bahwa isu dan aspirasi yang berkaitan dengan perempuan tidak harus disampaikan oleh perempuan
2. Keterwakilan keberadaan (eksistensi). Dalam konsep ini, isu dan aspirasi yang berkaitan dengan perempuan harus digerakkan oleh perempuan itu sendiri. Konsep ini memiliki dua rasionalitas:
  - a. tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; dan

---

<sup>26</sup> Hardy-Fanta, Carol, Pei-te Lien, Dianne Pinderhughes, and Christine Marie Sierra. 2016. *Contested Transformation*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

- b. Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri.<sup>27</sup>

Penelitian terhadap perempuan dan politik telah dilakukan di banyak negara. Nikki Craske (1999) dalam penelitian yang dilakukannya di Amerika Latin mengintroduksi konsep baru yang disebut '*political motherhood*' yang menggambarkan perkembangan politik perempuan yang semakin diakui eksistensinya untuk berpartisipasi secara aktif pada berbagai lini.<sup>28</sup> Namun, dalam perkembangannya tidak semua usaha berjalan dengan baik. Dalam penelitiannya, Ferricha (2010) mengidentifikasi beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para politisi perempuan di Indonesia:<sup>29</sup>

1. Kendala individual dalam bentuk keterbatasan pendidikan dan pengalaman. Sejak awal politik serta berorganisasi selalu dicitrakan sebagai dunia laki-laki. Citra ini sedemikian kuat sehingga penampilan politik selalu memiliki wajah dan gaya hidup laki-laki. Sehingga, perempuan yang masuk area ini selalu mendapatkan pandangan dan bahkan stigma negatif. Para perempuan itu selalu distigma sebagai perempuan ambisius, perempuan tidak tahu diri, dan tidak sedikit yang menyebut mereka sebagai perempuan yang tidak bermoral.
2. Kendala struktural. Anggapan bahwa perempuan tidak mampu berpolitik serta berorganisasi, karena perempuan tidak memiliki hak-hak berpolitik sebesar yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Tidak mendapatkan dukungan suami atau keluarga serta perempuan kurang memiliki rasa percaya diri karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

---

<sup>27</sup> Latifah Iskandar, 2008, 'Peran Perempuan Parlemen', dalam Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008

<sup>28</sup> Craske, Nikki. 1999. *Women & Politics in America Latin*. United States : Rutgers University Press

<sup>29</sup> Dian Farricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi*, (Malang: Bayumedia Publising, 2010), hlm. 25.

3. Kedala kultural. Umumnya, para perempuan masih dibebani oleh peran-peran tradisional. Perempuan selalu diletakkan dengan lebel pemikul beban ganda, yakni beban domestik sebagai ibu atau istri atau anak perempuan yang harus mengurus keluarganya. Sehingga dianggap tidak layak jika berorganisasi masyarakat Islam.
4. Aggapan rendah terhadap martabat perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertakwa, termasuk perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan untuk menentukan segala apapun. Sayangnya ajara yang ideal dan luhur tersebut, khususnya berkaitan dengan relasi perempuan untuk menentukan kebebasannya dalam kesehatan tidak terimplentasi dengan baik. Praktek berkaitan dengan posisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis, yang menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Desain penelitian ini bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta empiris di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dalam kebijakan pengarusutamaan gender dalam kaitannya dengan partisipasi sosial dan politik.

#### **3.1 Operasionalisasi Konsep Penelitian**

Operasionalisasi penelitian dilakukan dengan memperjelas definisi konsep, sebagai berikut:

1. Strategi politik didefinisikan sebagai cara, upaya dari partai politik, kandidat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini juga memerlukan berbagai pertimbangan seperti pangsa pasar politik, sejarah, nilai-nilai budaya, pihak oposisi, sumber daya, dan tujuan akhir.
2. Politik gender mengacu pada perdebatan peran perempuan dan laki-laki dalam ranah politik dan di negara-negara berkembang, politik gender dimaksudkan untuk mendorong tingkat partisipasi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, salah satunya melalui *affirmative action*.
3. Keterwakilan perempuan dalam politik diartikan sebagai proporsi perempuan yang duduk di posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai perwakilan penduduk perempuan di tingkat nasional maupun lokal.
4. Isu-isu keperempuanan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan hidup perempuan, beberapa hal diantaranya adalah, *sexism*, diskriminasi gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara Ketua KPU Provinsi Lampung dan pasangan gubernur, wakil gubernur terpilih. Informan Informan lainnya meliputi perwakilan dari *voters* dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi lainnya yang bergerak di bidang keperempuanan. Teknik *snowball* akan dilakukan untuk mengidentifikasi informan lainnya. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Di tahap akhir, akan dilakukan *focused group discussion* dengan mempertemukan perwakilan masyarakat, beberapa anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, panitia TPS, dan perwakilan pemerintah kabupaten serta peneliti untuk membahas isu penelitian. Selain data primer, data sekunder akan dikumpulkan dari peraturan daerah, peraturan bupati, dokumen statistik dan laporan kegiatan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

### **3.3 Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan**

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah model alir yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, analisa data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data akan dilakukan dengan teknik triangulasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang akan diperkuat dengan penyajian data statistika deskriptif seperlunya.

### **3.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung. Lokus penelitian ditetapkan secara *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam mengenai bagaimana politik gender berpengaruh terhadap suara yang didulang oleh pasangan nomor urut satu tersebut. Sedangkan durasi waktu yang dibutuhkan adalah satu tahun anggaran (Tabel 3.1)

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan ke					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	Finalisasi instrumen	■					
2	Pengumpulan data di lapangan		■	■			
3	Pengolahan data				■		
4	Penyusunan hasil penelitian					■	■
5	Publikasi ilmiah						■

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

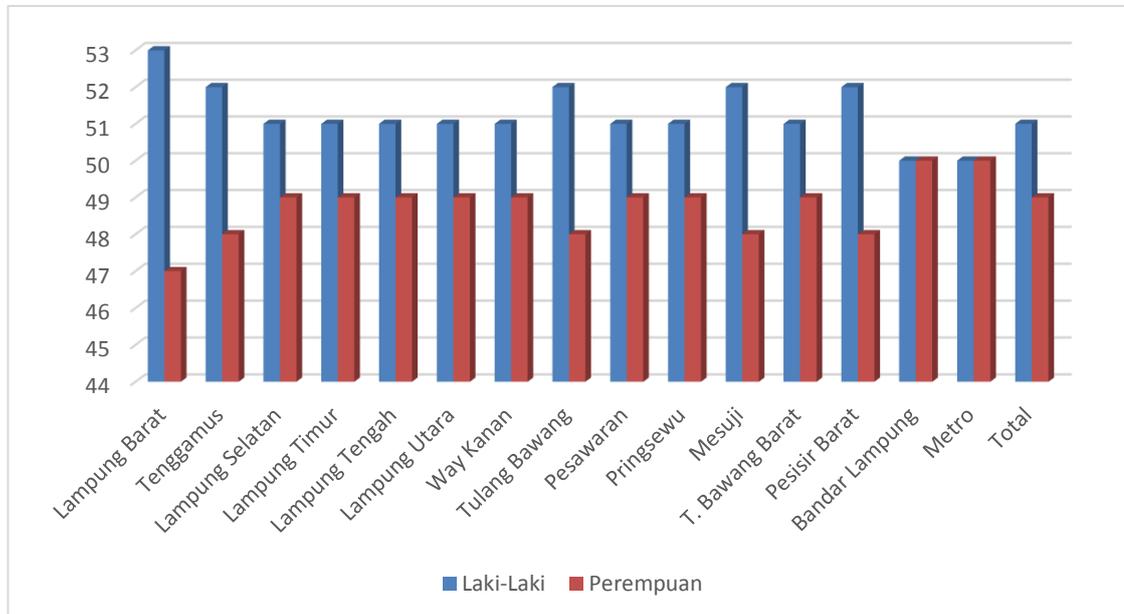
##### **4.1.1 Potret Gender di Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang relatif memiliki keseimbangan jika dilihat dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2017 adalah sebanyak 8.289.577 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.247.121 jiwa (51 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 4.042.456 jiwa (49 persen). Persebaran penduduk di setiap kabupaten/ kota juga sangat beragam, dari yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.261.498 jiwa hingga yang paling sedikit di di Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah 152.529 jiwa. Sementara itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk 1.015.910 jiwa. Dilihat dari rasio jenis kelaminnya, di Provinsi Lampung mencapai 105,06 dengan yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan indeks rasionya sebesar 113,21. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kota Metro dimana rasio jenis kelaminnya adalah 99,84.<sup>30</sup> Berikut ini ditampilkan penduduk laki-laki dan perempuan jika dilihat dari persentasenya pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

---

<sup>30</sup> Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk lakilaki untuk 100 Penduduk perempuan.

**Gambar 4.1**  
**Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung tahun 2017**

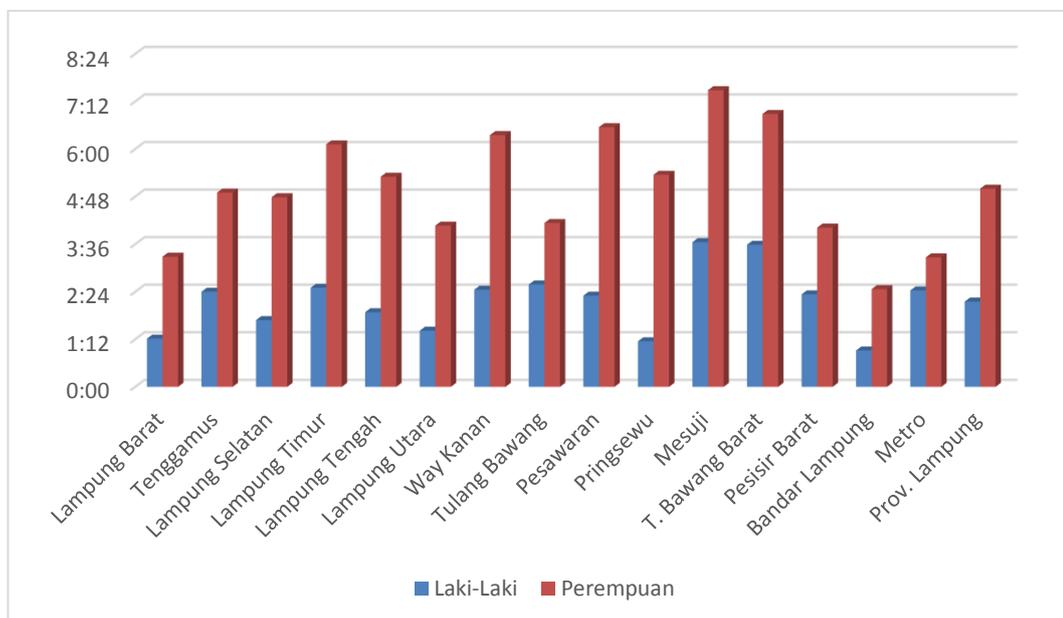


Berdasarkan data rasio penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung tersebut maka dapat dilihat bahwa pada umumnya jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan kecuali di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dimana rasio keduanya hampir setara. Namun jika dilihat dari totalnya, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi ketimpangan yang begitu berarti antara jumlah penduduk dari kedua gender dimana persentasenya sebesar 51 persen dan 49 persen.

Terlepas dari data kuantitatif di atas, kajian tentang gender saat ini sedang marak dilakukan. Ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan yang menyangkut peran laki-laki dan perempuan masih merupakan isu sentral yang menarik untuk dieksplorasi. Dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, masih jamak ditemukan permasalahan yang menunjukkan bahwa masih perlunya upaya yang signifikan untuk mengurangi dan menghapus kesenjangan tersebut.

Salah satu aspek yang masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di Provinsi Lampung adalah pada bidang pendidikan. Sebagai salah satu indikator pada bidang pendidikan, berdasarkan aspek kemampuan membaca dan menulis pada penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas dapat dilihat dari Gambar 4.2 berikut ini.

**Gambar 4.2**  
**Persentase Penduduk Buta Aksara Berumur 15 Tahun Ke Atas**  
**menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin**  
**di Provinsi Lampung Tahun 2017**

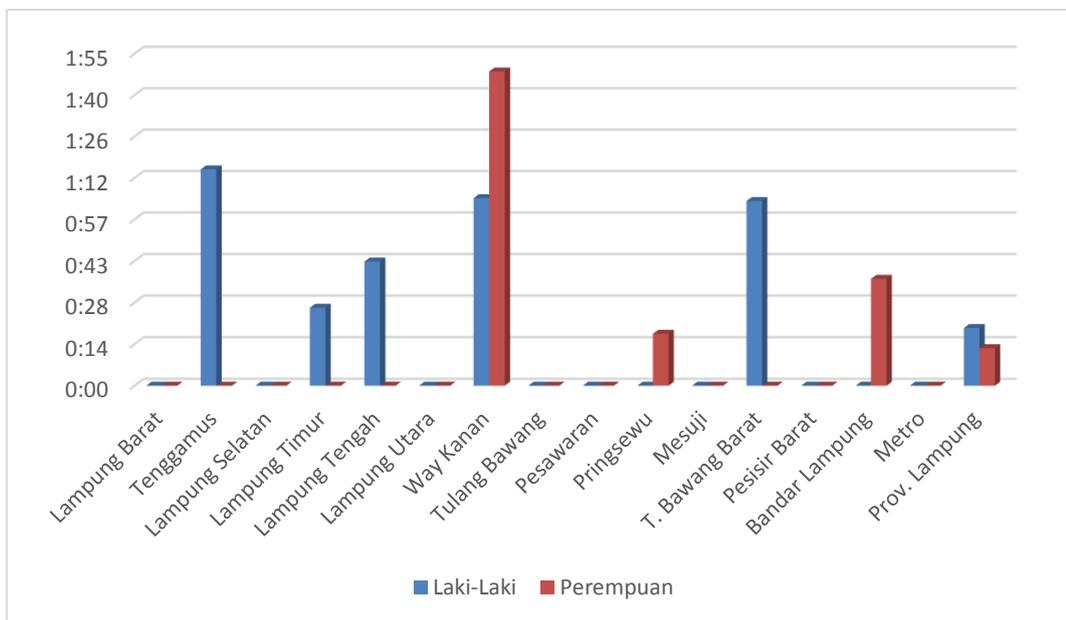


Berdasarkan Gambar 4.2 di atas maka tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan masih lebih rendah dari penduduk laki-laki. Sayangnya, kecenderungan tersebut terjadi pada semua kabupaten/ kota di Provinsi Lampung dimana yang paling tinggi gap nya ada di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten

Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Mesuji.

Jika data tersebut lebih dikerucutkan lagi, yaitu dengan melihat persentase penduduk yang buta aksara pada rentang umur 15-24 tahun maka didapatkan hasil yang lebih menjanjikan sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini.

**Gambar 4.3**  
**Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun menurut**  
**Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan**  
**Menulis di Provinsi Lampung, 2017**



Berdasarkan Gambar 4.3 di atas maka dapat dilihat bahwa dalam rentang usia tersebut lebih dari setengah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dikatakan terbebas dari buta aksara. Selain itu, pada beberapa kabupaten, jumlah penduduk perempuan yang buta aksara lebih rendah dari penduduk laki-laki seperti di Kabupaten

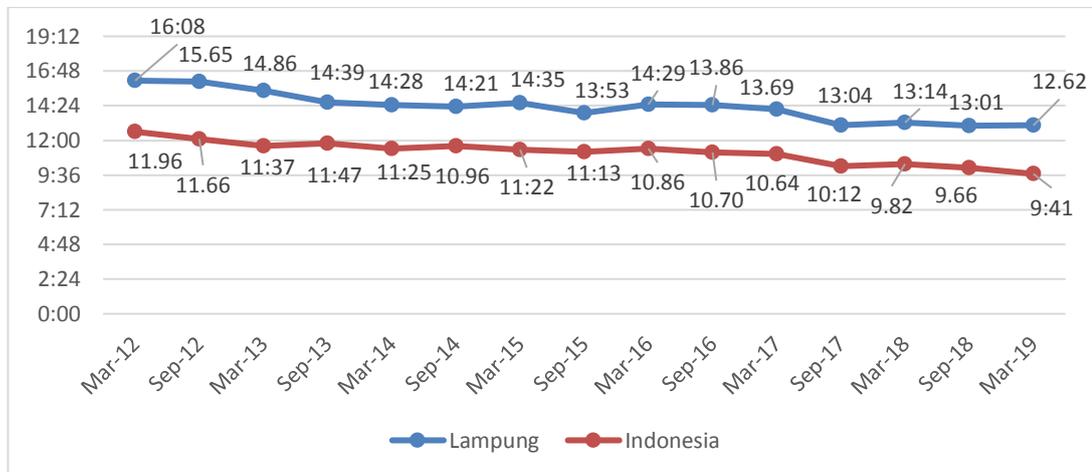
Tenggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hanya ada tiga kabupaten/kota yang memiliki tingkat buta aksara penduduk perempuan lebih tinggi seperti pada Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, dan Kota Bandar Lampung. Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan pada rentang umur 15-24 tahun di Provinsi Lampung lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki.

Gambar 4.3 mengindikasikan perkembangan pendidikan penduduk wanita pada segmen usia 15 tahun hingga 24 tahun sudah menggembirakan karena tidak hanya menyamai penduduk laki-laki tetapi bahkan di banyak tempat lebih unggul. Data ini memberikan harapan ke depan kemampuan penduduk perempuan akan semakin meningkat secara merata. Untuk itu, kontrol dari pemerintah secara berkesinambungan perlu untuk diupayakan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu berangkat dari pemahaman akan akar masalah dari ketimpangan yang terjadi antargender khususnya di Provinsi Lampung.

Paling tidak ada tiga faktor utama yang menjadi penyumbang eksistensi dari kesenjangan tersebut, antara lain: faktor ekonomi (kemiskinan), faktor usia, dan faktor sosial-budaya. Ketiga faktor ini tidaklah berdiri sendiri. Mereka saling mempengaruhi dan berkontribusi bagi kesenjangan itu sendiri.

**Pertama adalah faktor ekonomi.** Walaupun persentase penduduk miskin memiliki kecenderungan penurunan semenjak tahun 2012 hingga saat ini (Gambar 4.4) tetapi angkanya masih di atas persentase nasional. Pada semester pertama tahun 2019 persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 12,62 persen dimana persentase nasional berada pada angka 9,41 persen.

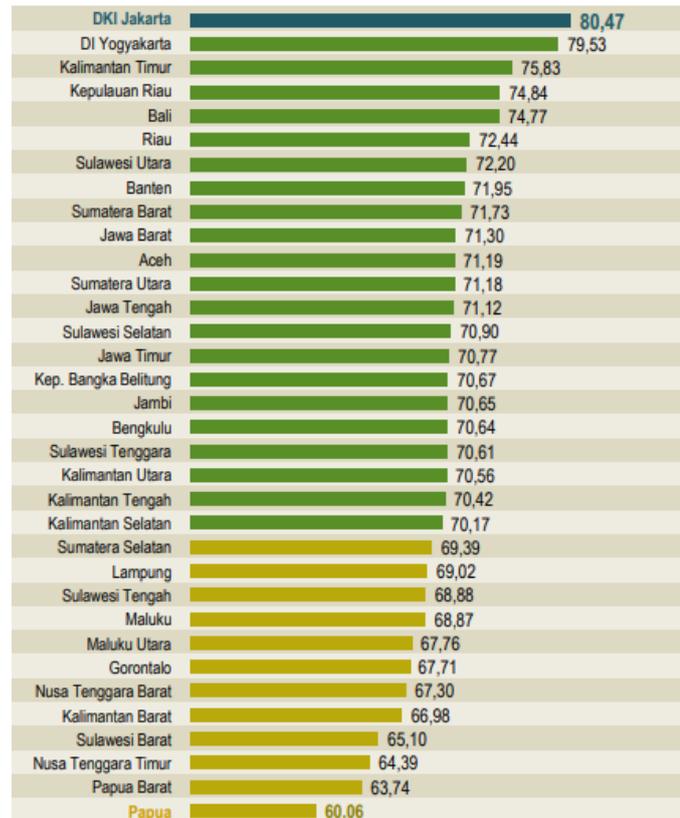
**Gambar 4.4**  
**Persentase Kemiskinan dan Penduduk Miskin**  
**di Provinsi Lampung dan Indonesia, 2012– Maret 2019**



Permasalahan ekonomi ini akan mempengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Permasalahan sekolah ini tidak hanya berkaitan dengan uang SPP, tetapi juga menyangkut dengan kemampuan dalam membeli seragam, buku, ongkos transportasi, jajan dan sebagainya. Selain itu, pergi ke sekolah juga akan membuat anak-anak memiliki waktu yang terbatas dalam membantu orang tuanya dalam mencari nafkah.

Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dalam kategori sedang yaitu 69,02, masih di bawah IPM Nasional yang sudah berada dalam kategori tinggi yaitu 71,39 (Gambar 4.5).

**Gambar 4.5**  
**Status Pembangunan Manusia Di Provinsi Tahun 2018**



**Kedua adalah faktor usia.** Faktor ini menunjukkan bahwa pada usia yang semakin tinggi maka semakin banyak penduduk perempuan yang buta aksara. Ini terkonfirmasi dengan Gambar 4.3 dimana jika melihat rentang usia 15-24 tahun, maka tingkat buta aksara perempuan malah lebih rendah dari laki-laki, berbeda hasilnya jika digabungkan dengan rentang usia di atas itu (Gambar 4.2). Kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan kondisi masa lalu ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk bersekolah. Begitu juga pengaruh geografis dan sosial budaya masa lalu di Provinsi Lampung yang tidak memungkinkan mereka untuk mengenyam pendidikan. Akibatnya sebagian besar dari mereka tidak memiliki kemampuan baca-tulis hingga saat ini karena mereka sudah tidak lagi berada pada usia sekolah.

**Ketiga adalah faktor sosial-budaya.** Faktor ini juga turut menjadi kendala bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikannya. Nilai-nilai yang menganggap bahwa posisi laki-laki berada di atas perempuan menyebabkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sebagian besar diberikan kepada laki-laki. Preferensi ini juga turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah, sehingga ketika orang tua tidak mampu menyekolahkan semua anaknya maka yang diprioritaskan adalah anak laki-laki. Walaupun demikian, di banyak tempat terutama di daerah perkotaan faktor sosial-budaya ini tidak lagi sekuat dulu karena masyarakat Lampung sudah mulai terbuka dengan perubahan zaman sehingga mengubah pola pikir dan persepsi mereka terhadap pendidikan.

Jika dilihat dari aspek ketenagakerjaan, penduduk perempuan masih berada di bawah penduduk laki-laki sebagaimana terlihat dari Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2017**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>2.655.363</b>	<b>1.417.124</b>	<b>4.072.487</b>
Bekerja	2.546.996	1.349.234	3.896.230
Pengangguran Terbuka	108.367	67.890	176.257

<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>422.399</b>	<b>1.508.816</b>	<b>1.931.215</b>
Sekolah	214.567	225.607	440.174
Mengurus RT	96.312	1.215.848	1.312.160
Lainnya	111.520	67.361	178.881
<b>Jumlah</b>	<b>3.077.762</b>	<b>2.925.940</b>	<b>6.003.702</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>86,28</b>	<b>48,43</b>	<b>67,83</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>	<b>4,08</b>	<b>4,79</b>	<b>4,33</b>

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, BPS 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat tingkat pengangguran penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Begitu juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dimana tingkat partisipasi penduduk perempuan hanya sekitar setengahnya dari penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena 41,5 persen penduduk perempuan yang berusia produktif merupakan ibu rumah tangga.

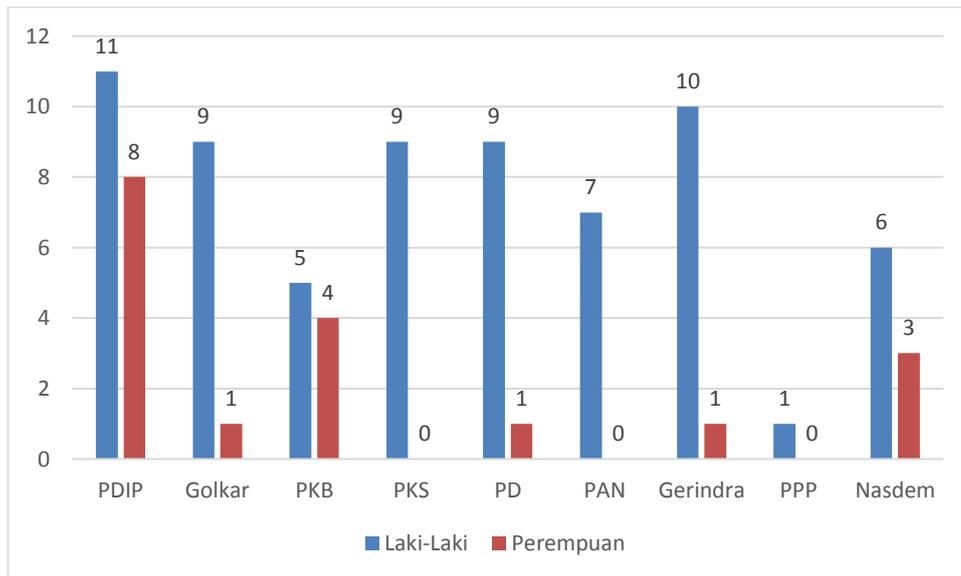
Jika dilihat dari kesempatan bagi perempuan sebagai aparat pemerintahan (PNS) persentasenya sudah cukup bagus dimana dari 17.088 PNS Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 48 persen di antaranya merupakan perempuan. Pada beberapa sektor, seperti pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa) jumlah PNS perempuan mengungguli PNS laki-laki sehingga merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya jumlah PNS perempuan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Lampung: 2018).

Selain itu, pada tataran politis, dilihat dari persentasi jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung perempuan terhadap laki-laki

didapatkan bahwa presentasinya masih di bawah 30%, Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6 berikut ini.

**Gambar 4.6**

**Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Periode 2019-2024**



Pemilu Serentak 2019 yang salah satunya memilih Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 menghasilkan 85 orang anggota dewan terpilih yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 316/PL.01.1-BA/03/Prov/VIII/2019. Berdasarkan Gambar 4.6 di atas jumlah anggota dewan terpilih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 67 orang atau 79% dan perempuan sebanyak 18 orang atau 21%. Dari angka ini terlihat bahwa representasi politik perempuan di lembaga DPRD Provinsi Lampung masih di bawah 30%. Secara lebih khusus, jika dilihat dari masing-masing partai politik, PDIP, PKB, dan Nasdem yang memiliki representasi politik perempuan yang sudah di atas 30%, sementara yang lainnya di bawah itu bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai wakil perempuan seperti PKS, PAN dan PPP.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan gender di atas maka dapat dikatakan bahwa secara umum masih terjadi ketimpangan gender bagi perempuan. Dari aspek pendidikan terutama dilihat dari kemampuan baca-tulis, jumlah penduduk perempuan yang memiliki kemampuan tersebut masih berada di bawah laki-laki. Kondisi ini terjadi pada hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung, kecuali di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dimana gap antargender terkait kemampuan baca-tulis tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan kesempatan kerja dimana perempuan usia produktif masih banyak hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga tingkat partisipasi kerjanya dibandingkan laki-laki masih tertinggal jauh. Tingkat buta aksara antargender secara umum menunjukkan bahwa perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Walaupun demikian, dilihat dari trennya, telah terjadi perubahan positif terutama pada generasi muda perempuan di Provinsi Lampung yang terlihat dari tingkat buta aksara umur 15-24 tahun yang sudah menurun drastis. Konsistensi dan upaya perbaikan secara terus-menerus, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial-budaya, perlu dilakukan agar kesenjangan antargender bisa terus ditekan.

Jika dilihat dari kesempatan kerja pada sektor pemerintahan (PNS), perempuan sudah mampu bersaing dengan laki-laki dengan persentase yang tidak terlalu jauh berbeda. Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi kesenjangan yang signifikan terkait kesempatan dalam bekerja pada sektor pemerintahan. Sebaliknya, kesempatan untuk berpartisipasi pada sektor pemerintahan sebagai anggota DPRD provinsi, keterwakilan perempuan masih dibawah 30%.

#### **4.1.2 Profil Hj. Chusnunia, Ph.D**

Chusnunia dilahirkan di Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 12 Juli 1982. Ia merupakan Wakil Gubernur Lampung yang telah menjabat sejak 12 Juni 2019 setelah sebelumnya dipercaya sebagai Bupati Lampung Timur. Chusnunia merupakan anak pertama dari pasangan KH. Abdul Chalim dan Kholisah. Ayahnya termasuk salah satu tokoh Nahdhatul Ulama yang terkemuka di Kabupaten Lampung Timur dan sekitarnya.

Pendidikan Chusnunia dimulai di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumber Rejo dan lulus pada tahun 1995. Tamat dari sekolah ini, ia melanjutkan pendidikan SMPN 3 Jabung dan lulus pada tahun 1998. Tiga tahun setelahnya, ia lulus di SMUN 1 Mayong Jepara. Selepas dari pendidikan menengah, Chusnunia kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Wali Songo dan lulus pada tahun 2005. Walaupun memiliki latar belakang pendidikan agama dan keluarga yang agamis, ia kemudian berminat melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum di Universitas Saburai. Kemudian ke sekolah pasca sarjana pada jurusan Ilmu Politik di Universitas Nasional dan lulus tahun 2011, Kenotariatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2014, , dan terakhir mendapatkan gelar Ph.D dari University of Malaya pada Jurusan Sastra dan Sains Nasional. Banyaknya pendidikan yang diikuti oleh Chusnunia dengan beragam bidang keilmuan baik dalam maupun luar negeri patut dijadikan contoh bagi perempuan Lampung untuk maju dalam bidang pendidikan.

Selain menempuh pendidikan, Chusnunia juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi pada saat menjadi mahasiswa. Beberapa organisasi yang diikutinya antara lain: Kepala Divisi Eksternal pada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dari tahun 2003 hingga tahun 2005, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dari tahun 2002 hingga tahun

2005, dan aktif menjadi Pengurus KNPI pada tahun 2015 hingga tahun 2018, kemudian aktif di IKA PMII dari tahun 2013 hingga sekarang, dan PP Fatayat NU dari tahun 2010 hingga sekarang.

Sebagai orang yang aktif berorganisasi, Chusnunia memiliki ketertarikan pada dinamika politik semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketika menempuh pendidikan di IAIN Wali Songo, Semarang, Chusnunia aktif berorganisasi dengan ditunjuk sebagai Wakil ketua HMJ Muamalah dari tahun 2001 sampai dengan 2002. Di luar kampus ia juga berkontribusi dalam membesarkan Ikatan Mahasiswa Sumatera di Semarang sebagai Ketua pada tahun 2001 hingga tahun 2002.

Karir Chusnunia pun terbilang bagus. Awal karir dimulai dengan bekerja sebagai Sekretaris pada divisi di Redaksi Jurnal Justisia di Surakarta dari tahun 2001 hingga tahun 2002 dan menjadi Kepala Divisi Eksternal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif tahun 2004. Dalam organisasi politik Chusnunia tergabung sebagai kader dan dipercaya sebagai Kepala Administrasi dan Keuangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 hingga tahun 2005. Dianggap berkinerja baik, maka ia diminta untuk menjadi Staf di DPP PKB di Jakarta dari tahun 2005 hingga tahun 2008.

Ketika koleganya, Erman Soeparno yang merupakan Bendahara Umum DPP PKB tahun 2007 dan sekaligus dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI periode dari tahun 2004 hingga tahun 2009 ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja pada saat Pemerintahan SBY. Oleh Soeparno, Chusnunia dipertimbangkan oleh DPP PKB sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja. Dalam kelompok staf khusus ini, ia diberikan kepercayaan menjadi Koordinator Zona di Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2008.

Chusnunia kemudian memulai karir politiknya dengan ikut serta dalam pemilu legislatif nasional 2009 dengan mencantumkan diri sebagai anggota DPR RI. Chusnunia mencalonkan diri menjadi calon legislatif melalui PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II yang salah satunya meliputi Kabupaten Lampung Timur sebagai tempat kelahirannya. Nasib baik pun menghampiri Chusnunia yang berhasil “melenggang ke senayan” periode 2009-2014. Di internal PKB sendiri Chusnunia semakin mendapat tanggung jawab yang lebih besar ketika Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mempercayakannya posisi strategis sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP PKB periode 2009-2014.

Aktivitas politik dari anggota dewan yang dulu tergabung dalam Komisi IX DPR RI ini pernah menyoroti program dari Menteri Kesehatan yang mempromosikan penggunaan kondom sebagai respon atas usaha untuk mencegah penyebaran HIV. Ia berpandangan bahwa masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu. Selain itu, politisi PKB ini pernah *walkout* ketika rapat dengan IX ketika membahas *merk* susu yang mengandung bakteri pada tahun 2011. Protesnya dilayangkan karena pemerintah dan Institut Pertanian Bogor (IPB) enggan untuk mengumumkan *merk* susu apa yang bermasalah tersebut. Ia berpandangan bahwa dengan keterbukaan informasi tersebut akan membuat bisa tenang dan menghindari susu yang mengandung bakteri tersebut.

Karir politisi ini di kursi dewan berlanjut pada periode berikutnya. Tahun 2014, Chusnunia berhasil kembali menduduki Senayan dengan didukung oleh 56.75 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II bersama dengan Ketua DPW PKB Lampung, Musa Zainuddin yang dipilih dari Dapil Lampung I. Mereka mewakili PKB di DPR untuk periode 2014-2019. Pada periode ini, Chusnunia

ia berada pada Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Setahun berselang, sang legislator memutuskan untuk mengikuti Pemilu Kepala Daerah Serentak 2015 sebagai salah satu kandidat di Kabupaten Lampung Timur, daerah asalnya. Ia maju bersama Zaiful Bukhori, seorang anggota DPRD Lampung Timur. Mereka didukung oleh dua parpol yaitu PKB dan Demokrat. Perhelatan tersebut pun berhasil membawa pasangan calon ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur. Keberhasilan Chusnunia ini menjadi pembuka jalan bagi terpilihnya perempuan sebagai bupati di Provinsi Lampung. Pertarungan mereka ini menyisihkan pasangan Amirullah-Sudarsono sebagai saingan terberat dengan raupan suara sebesar 54,04% berbanding 45,96%. Pasangan kepala daerah terpilih ini kemudian pada tanggal 17 Februari 2016 resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2016-2021.

Pada tahun 2018, tiga tahun sebelum berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Lampung Timur, ia kembali mencoba peruntungan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Kali ini ia mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai calon Wakil Gubernur Lampung dengan berpasangan dengan Arinal Djunaidi. Keberuntungan kembali berada pihak Chusnunia dengan keberhasilan pasangan yang didukung oleh Golkar, PKB, dan PAN sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024.

Kemenangan pasangan yang sering disebut juga sebagai Arinal-Nunik ini meraih 1.548.506 atau 37,78% dari 4.179.405 surat suara. Dengan perolehan ini, mereka berhasil menumbangkan pasangan nomor urut yang merupakan petahana yaitu Ridho-Bachtiar yang menduduki peringkat ketiga dengan perolehan sebanyak 1.043.666 suara atau 25,46%.

#### **4.1.3 Politik Gender dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung**

Kajian tentang gender yang saat ini sedang marak dilakukan mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan yang menyangkut peran laki-laki dan perempuan masih merupakan isu sentral yang menarik untuk dielaborasi. Dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, masih jamak ditemukan permasalahan yang menunjukkan bahwa masih perlunya upaya yang signifikan untuk mengurangi dan menghapus kesenjangan tersebut. Di bidang politik, keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah kurang dari kuota minimal 30%. Salah satu penyebabnya adalah persepsi masyarakat dimana masih kentalnya budaya patriarki di negara Indonesia ini khususnya di Provinsi Lampung dalam membentuk opini masyarakat. Perempuan dianggap bukanlah orang yang tepat untuk memimpin sebuah daerah. Perempuan dianggap bukanlah lawan sebanding laki-laki, apalagi kandidat lain merupakan figur yang memang telah dikenal di masyarakat dan telah mempersiapkan pencalonannya lebih dulu.

Provinsi Lampung semenjak pilkada serentak tahun 2015-2018 menunjukkan awal kemunculan perempuan yang berhasil terpilih sebagai pejabat publik pada lembaga eksekutif. Pada tingkat Kabupaten/Kota terpilih Bupati Tulang Bawang, Winarti; Bupati Lampung Timur, Chusnunia; Bupati Tanggamus, Dewi Handajani; dan Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina. Sedangkan pada tingkat provinsi, Bupati Lampung Timur, Chusnunia yang belum habis masa jabatannya berhasil menduduki posisi wakil gubernur pada Pilkada serentak 2018. Prestasi ini menobatkan Chusnunia sebagai perempuan pertama yang memenangi pilkada pada tingkat provinsi di Lampung.

Posisinya tersebut disahkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kept/18/Prov/VII/2018 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli tahun 2018 yang menetapkan pasangan Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dengan perolehan suara lebih dari 1,5 juta atau 37,78 persen.

**Tabel 4.2**  
**Perolehan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur**  
**Lampung Periode 2019 s.d 2024**

No. Urut	Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si Bachtiar Basri, SH., MM	1.043.666
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, MM Ir. Sutono, MM	1.054.646
<b>3.</b>	<b>Ir. Arinal Djunaidi</b> <b>Hj. Chusnunia, Ph.D</b>	<b>1.548.506</b>
4.	Dr. H. Mustafa H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si	452.454
<b>Total</b>		<b>4.099.272</b>

Walaupun perempuan sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam politik di Lampung, kemenangan Chusnunia dalam Pilkada Provinsi Lampung tahun 2018 tidaklah terlepas dari berbagai isu negatif yang menyerang pribadinya, bahkan isu tersebut mulai dihembuskan semenjak awal ia terpilih sebagai Bupati Lampung Timur. Serangan pribadi tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga

Pengawas Pelayanan informasi Publik (LP3) yang mempertanyakan status dari anak Chusnunia, sementara Chusnunia sendiri belum menikah. Serangan itu didasari karena pada saat pencalonan sebagai Bupati Lampung Timur status Chusnunia masih lajang.<sup>31</sup>

Koordinator Lapangan, Johan Abidin, pada saat orasinya di depan kantor bupati menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat tiga versi dari status anak Chusnunia. *Pertama*, anaknya tersebut merupakan anak kandungnya sedangkan ayahnya sedang bekerja di Australia. *Kedua*, anaknya tersebut merupakan anak angkat yang diadopsi dari salah satu Rumah Sakit yang ada di Jakarta, hal itu dilakukan karena yang bersangkutan (Chusnunia) pernah di vonis menderita Kanker Rahim dan tidak akan memiliki keturunan. Sedangkan versi *terakhir*, didapatkan informasi bahwa anak tersebut diadopsi Chusnunia dari negara tetangga Malaysia, hal ini ada kesesuaian nama dari anak yang berinisial AJ tersebut dengan tempat lahir anak tersebut, yakni Johor Baru Malaysia.<sup>32</sup>

Aksi para demonstran yang dilakukan di depan kantor bupati tersebut ditanggapi oleh Setdakab Syahrudin dan Asisten I Tarmizi Suhaemi dan disaksikan oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Yudi Chandra Erlianto. Syahrudin menjelaskan bahwa AJ (10) merupakan anak adopsi dari Chusnunia berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2010. Namun Sekda tidak menjelaskan lebih lanjut siapa nama orang tua kandung dari AJ tersebut. Para perwakilan demonstran merasa tidak puas dan mengancam akan menuntut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga tes DNA.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.suaralampung.com/2017/07/unjuk-rasa-hiasi-pemda-lampung-timur.html>  
<http://newslampungterkini.com/news/11320/ratusan-warga-datangi-pemkab-pertanyakan-status-anak-angkat-bupati-lamtim.html>

<sup>32</sup> <http://www.suarapedia.com/detail/berita/2423/status-anak-angkat-bupati-lampung-timur-dipertanyakannbsp>

<sup>33</sup> <https://newslampungterkini.com/news/11325/sekdakab-lamtim-syahrudin-aj-anak-adopsi-chusnunia-chalim.html>

Aksi para demonstran ini diduga memiliki motif politis untuk menjatuhkan kredibilitas Chusnunia.<sup>34</sup> Menanggapi demonstrasi ini, Chusnunia menekankan agar lawan politiknya tidak menjadikan anak-anak sebagai komoditas politik dan mengingatkan agar demonstrasi seharusnya ditujukan kepada orang-orang yang menelantarkan anak, bukan kepada dirinya yang justru mengadopsi anak.

Permasalahan ini akhirnya berlanjut kepada ranah hukum karena Lembaga Perlindungan anak Indonesia (LPAI) Lampung Timur yang mendampingi Bupati Lampung Timur Chusnunia melaporkan LP3RI ke Polres setempat dengan nomor 001/LPAI-LTM/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017. Pengaduan dari LPAI ini dilakukan dalam konteks adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan pendemo LP3 RI dengan memasang foto seorang anak sebagai objek aksi unjuk rasa. Selain itu, LPAI Lampung Timur memandang anak angkat Chusnunia, AJ, telah mengalami eksploitasi sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam, atau menakut nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, dan tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, serta mengeluarkan kata-kata kurang baik untuk perkembangan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.suara.com/news/2017/07/23/131505/chusnunia-chalim-sedih-adopsi-anak-malah-didemo-ormas>

<sup>35</sup> <https://suryaandalas.co.id/2017/07/24/buntut-aksi-lp3ri-lampung-timur/>

### **4.3 Strategi Politik dalam Menghadapi Isu-isu Keperempuan**

Semenjak sistem demokrasi digulirkan di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong partisipasi publik untuk turut serta dalam proses pembangunan politik. Salah satu usahanya yaitu dengan menerapkan kebijakan *affirmative action* dimana partai politik diwajibkan memiliki minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat yang terjun di ranah kontestasi eksekutif maupun legislatif. Dengan kondisi ini, tentu sistem konvensional yang dulu hanya berporos ke satu partai dan ideologi partai penguasa, harus beralih dan menjadikan partai mau tidak mau harus bergerak aktif untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari akar rumput. Oleh karena itu, sebelum pemilihan dilaksanakan, manajemen partai menerapkan berbagai kebijakan dan strategi khusus untuk mendulang suara sebanyak mungkin.

Strategi politik sendiri sejatinya diartikan secara sederhana sebagai bagaimana partai dan kandidat bahu membahu untuk berpikir dan merencanakan cara untuk mencapai tujuan mereka. Pertimbangan dalam memilih cara sendiri berkaitan dengan faktor-faktor yang dianggap penting di lapangan, yakni budaya masyarakat setempat, bagaimana sejarah lokal, sumber daya yang dimiliki hingga kompetitor yang akan mereka hadapi.

Lebih jauh, Nielsen (2011) dalam artikelnya yang berjudul “*Three faces of political marketing strategy*” menyatakan bahwa istilah strategi politik seharusnya didefinisikan tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi melihat berbagai dimensi, yakni dari desain, interpretasi dan signifikansinya. Tiga dimensi tersebut mengarah pada asumsi para aktor, lingkungan politik, tujuan strategi, dan juga kemungkinan konflik yang akan dihadapi jika rencana kebijakan diterapkan. Merujuk pada kompleksitas dan betapa luasnya definisi ini, selanjutnya dalam pembahasan dan analisis, penulis akan menjadikan teori Nielsen sebagai referensi dalam menguraikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan gubernur Lampung terpilih dalam pemilihan gubernur Provinsi Lampung dalam menanggapi stigma dan isu-isu keperempuan. Selain membahas

bagaimana strategi tim sukses dan kandidat dalam menjalankan kampanyenya, disini juga akan dianalisis isu-isu apa saja yang mengemuka ke permukaan ketika kampanye berjalan.

Sebelum menguraikan bagaimana asumsi politik gubernur dan wagub terpilih yang berlaga dalam kontestasi pilkada Provinsi Lampung, perlu diketahui bahwa Lampung sesuai yang diuraikan dalam gambaran umum lokasi adalah daerah yang multi-etnis. Menariknya, populasi Provinsi Lampung didominasi oleh komunitas suku Jawa, bukan populasi asli Lampung. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa mayoritas pemilih di Lampung memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pemilih dari Suku Jawa (terutama daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta).

Keterbukaan masyarakat Lampung dalam menerima warga dari luar komunitas, juga tercermin bagaimana masyarakat juga sangat terbuka dalam menerima adanya pemimpin perempuan di daerah mereka. Meski tren kepemimpinan perempuan di Provinsi Lampung dapat dikatakan merupakan hal yang 'baru' karena terjadi di enam hingga tujuh tahun terakhir, namun tren tersebut kemudian menggerakkan semakin banyak perempuan untuk berkiprah di ranah politik. Wakil gubernur terpilih dalam pilkada tahun lalu juga menjadi pemimpin perempuan pertama di Provinsi Lampung yang mendapatkan kesempatan menjadi Bupati Lampung Timur. Dari sini bisa dilihat bahwa munculnya pemimpin perempuan di satu wilayah ternyata mampu menggerakkan politisi perempuan lain untuk lebih intensif bergerak saat terjun di dunia politik.

Pilkada Provinsi Lampung sendiri diikuti oleh empat kandidat, yakni M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, dan Mustafa-Ahmad Jajuli. Dalam hasil akhir yang diumumkan oleh KPU Provinsi Lampung, pasangan terpilih, yaitu nomor 3 Arinal-Nunik meraih 1.584.506 suara atau 37,78% dari total surat suara yang ada. Sedangkan pasangan petahana yang mendapatkan nomor urut satu memperoleh 25,46% suara atau setara dengan 1.043.666. Persentase yang hampir sama diperoleh pasangan Herman HN-Sutono atau kandidat

nomor urut dua dengan 25,73% atau 1.054.646 suara. Di posisi terakhir, pasangan nomor 4 hanya mendapatkan 11,04% suara atau 454.452 suara.

Kemenangan yang diperoleh oleh pasangan nomor tiga sendiri sebenarnya tidak banyak diprediksi oleh para pengamat politik. Di awal kampanye, beberapa pihak malah berasumsi bahwa pasangan nomor urut terakhir dan kandidat petahana lah yang akan mendulang banyak suara. Namun dalam perkembangan selanjutnya, justru calon dari PKS malah tertangkap tangan oleh KPK dan kemudian mengubah peta perpolitikan sebelum pilkada dilaksanakan. Kemelut politik ini kemudian meningkatkan probabilitas calon kepala daerah lain untuk mendulang suara yang jauh lebih besar, termasuk calon terpilih. Analisis detail bagaimana strategi dari pasangan terpilih, diuraikan lebih mendalam pada paragraph lanjutan berikut.

#### **4.3.1 Desain Strategi**

Dalam pemilihan kepala daerah, desain strategi politik yang tepat akan membantu kandidat dalam mencapai suara tertinggi untuk menduduki posisi nomor satu di wilayahnya. Oleh karena itu, beberapa prinsip pokok yang perlu dipertimbangkan oleh partai pengusung dan tim sukses seperti *positioning*, *branding*, *segmenting* hingga strategi media maupun non-media harus betul-betul disiapkan secara maksimal.

Dari hasil wawancara dengan tim kampanye inti, baik dari Golkar maupun PKB, strategi *positioning* Arinal dan Nunik sudah diaplikasikan, bahkan jauh-jauh hari setelah dideklarasikan sebagai pasangan politik. Sebagai satu-satunya pasangan yang maju dengan figur perempuan, mereka diposisikan partai untuk dapat meraup suara dari kalangan ibu-ibu dan remaja putri. Hal ini juga diuntungkan dengan latar belakang Nunik yang merupakan anak kiai masyhur di daerah Lampung, sehingga dapat membantu mereka untuk mendulang suara, terutama jamaah pengajian dan dari kalangan Nahdlatul Ulama/NU. Untuk metode *political positioning*

yang dilakukan oleh partai, secara garis besar dapat dibagi dalam beberapa langkah berikut:

### **1) Penentuan segmen pemilih**

Melihat demografis Lampung yang mayoritas merupakan pendatang dari Jawa, sasaran pemilih dari pasangan kandidat ini adalah para pendatang dan juga kantong-kantong suara di wilayah padat penduduk, termasuk Kabupaten Lampung Timur yang merupakan basis pendukung Nunik dari awal. Selain itu, dengan usianya yang masih muda, strategi kampanye Nunik juga diarahkan untuk menggaet pemilih pemula dan juga pemilih muda yang banyak berdomisili di wilayah perkotaan. Tidak hanya itu, kalangan perempuan terutama ibu-ibu pengajian juga masuk dalam target pemilih pasangan nomor urut tiga ini.

### **2) Penentuan skala prioritas penyapaan**

Meski penetrasi internet di Indonesia cukup besar, namun untuk wilayah Provinsi Lampung sendiri penggunaan *smartphone* masih terbatas di daerah urban, perkotaan. Sedangkan di pedesaan, tingkat penggunaannya masih terbatas. Sehingga dalam kampanye yang lalu, Nunik dan tim sukses kandidat lebih banyak bergerilya dari kampung ke kampung. Disebutkan oleh perwakilan Lembaga Pemenangan Arinal-Nunik dari PKB, pada saat masa kampanye, mereka mengedepankan strategi *canvassing* dan *door to door* untuk mengenalkan pasangan yang diusung. Tidak hanya mempromosikan figure Arinal dan Nunik secara langsung, mereka juga aktif menyampaikan apa saja agenda kerja yang akan diterapkan, apabila Arinal-Nunik terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Salah satu agenda kerja mereka adalah program pemberdayaan petani dan program pemberdayaan perempuan.

### **3) Penyusunan isu-isu kampanye**

Meski bukan termasuk sebagai daerah kantong kemiskinan di Indonesia, Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan pelik yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak terlampau tinggi, termasuk dalam hal pelayanan publik, sosial ekonomi, dan pendidikan. Tiga bidang yang belum maksimal ini kemudian berdampak pada terjadinya konflik dan juga tingkat kriminalitas. Mempertimbangkan kondisi tersebut, isu-isu yang diusung oleh tim kampanye kemudian banyak menyinggung ketiga masalah tadi, dengan mengedepankan dialog dan juga mengadakan forum-forum dengan warga. Berkaitan dengan program sosial ekonomi yang mereka angkat, dari pihak tim sukses juga memamerkan kartu tani yang sedianya akan diberikan kepada para petani di wilayah Lampung (setelah mereka terpilih), agar mereka dapat mengakses kebutuhan untuk menunjang aktivitas pertanian mereka. Sedangkan di bidang pelayanan publik, kiprah Arinal yang sudah lama duduk di jajaran birokrasi dan Nunik yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai bupati Lampung Timur, turut mendongkrak reputasi mereka dalam pengusungan isu penting ini ke ranah publik. Pada bidang terakhir, yakni pendidikan, banyak agenda peningkatan kualitas pendidikan yang dijalankan oleh Nunik saat menjabat di Kabupaten Lampung Timur, kemudian dipromokan ketika ia melakukan kampanye sebagai calon wakil gubernur Lampung.

#### **4.3.2 Interpretasi Strategi**

Kontestasi kepala daerah Lampung yang cukup kompetitif memerlukan interpretasi strategi yang komprehensif dan efektif. Dengan adanya penafsiran strategi yang tepat, diharapkan peluang perolehan suara di wilayah-wilayah padat penduduk dapat terjaring secara maksimal. Pada tahapan ini, aspek interpretasi tidak hanya

dilihat dari segi penerapan kegiatan semata, tetapi juga menitikberatkan pada konsistensi pelaksana di lapangan, pemaksimalan sumber daya hingga penyusunan prioritas program kampanye.

Menyorot aspek penerapan kegiatan kampanye, dikutip dari hasil wawancara dengan perwakilan lembaga pemenangan PKB, Mursaidin Al Bantani, pihaknya dalam menjalankan strategi perencanaan kampanye lebih mengedepankan terserapnya *cost* politik yang tinggi:

Ketika kampanye, kubu kami mencoba untuk memaksimalkan *cost* politik yang ada. Jadi, ketika menggelar kampanye besar di beberapa tempat, yang menghadirkan beberapa figur seperti Via Vallen dan Ustadz Somad. Kami membantu para warga yang datang dengan mengganti ongkos transportasi ke tempat acara. Selain itu, kami juga menyediakan makan dan minum pada saat acara berlangsung.

Selain memaksimalkan penyerapan *political cost* pada saat kampanye berlangsung, kedekatan organisasi NU dan PKB menjadi peluang tersendiri dalam pemaksimalan strategi kampanye. Organisasi keagamaan tersebut dalam hal ini memegang peranan penting dalam upaya mobilisasi massa di Lampung, terlebih pemilih Lampung yang mayoritas muslim banyak berafiliasi pada kiai-kiai NU. Sehingga ketika PKB menggelar kampanye dengan mengisinya dengan pengajian, banyak warga yang datang dengan antusias.

Hubungan kuat ini semakin meningkat taktala Nunik adalah kader NU yang sangat aktif dalam organisasi, meski kiprahnya lebih banyak di tingkat nasional. Namun hal tersebut tertutupi dengan figuritas sang ayah, yang juga merupakan ulama yang disegani di daerah selatan pulau Sumatra. Tidak hanya itu, sepak terjang Nunik di Lampung Timur yang berhasil menarik simpati warga juga dapat dikatakan sebagai poin plus yang kemudian memberikan dampak positif pada pasangan nomor urut tiga.

Aspek lain dari sisi penerapan perencanaan yang membuahkan hasil baik pada kampanye Arinal-Nunik adalah pembagian tugas di antara lembaga pemenangan yang efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan perwakilan partai Golkar, pihaknya dalam sinkronisasi rencana kampanye, sudah membagi secara rata dengan partai koalisi lainnya, yakni PKB dan PAN dalam mempromosikan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung:

Pembagian wilayah kampanye dibagi rata. Baik, Golkar, PKB, dan PAN bahu membahu memaksimalkan waktu yang diberikan oleh KPU. Semua wilayah pemilihan di Lampung kami datangi. Kami juga menyadari bahwa media sosial di Lampung tidak terlalu besar pengaruhnya di Lampung, mungkin iya bagi pemilih muda di daerah perkotaan, tapi itu persentasinya kecil sekali. Jadi, kami memaksimalkan kampanye dengan metode *canvassing*, mendatangi konstituen secara langsung.

Pola komunikasi *face to face* yang diterapkan oleh Arinal-Nunik, terutama Nunik kepada kalangan ibu-ibu pengajian dinilai jauh lebih efektif dibandingkan kampanye kandidat yang lain. Tidak hanya aktif mengikuti pengajian, Chusnunia Chalim juga kerap melakukan *blusukan* ke berbagai pasar tradisional untuk memperoleh simpati warga. Dengan sosialisasi yang intensif tersebut, Chusnunia atau Nunik dapat meluluhkan warga dan memperoleh suara yang cukup besar pada pemilihan gubernur tempo lalu.

Untuk di wilayah Provinsi Lampung sendiri, karakter pemilihnya yang cukup heterogen, sehingga kandidat juga perlu mempertimbangkan preferensi personal pemilih yang mayoritas masih bertipe emosional. Tipe seperti ini memiliki hubungan emosional yang kuat dengan identitas personalnya, sehingga keterikatan tersebut juga mendorong terbentuknya kecenderungan politik dengan latar belakang yang sama. Meski pemilih tipe tradisional berbasis identitas, namun mereka masih terbagi menjadi

dua jenis: aktif dan pasif. Pemilih tradisional aktif cenderung responsive dalam merespon isu yang menyinggung kandidat yang didukungnya. Sedangkan pemilih emosional pasif, mereka tidak terlalu terbuka dalam menampilkan pilihan politik mereka.

Melihat karakteristik pemilih di Lampung yang sebagian besar bertipe emosional, kubu Arinal dan Nunik mengedepankan strategi pendekatan massa yang cukup efektif. Hasil wawancara penulis dengan perwakilan tim pemenangan baik dari Golkar maupun PKB, menunjukkan bahwa kedua partai melihat profil demografi ini dengan cara memaksimalkan pendekatan langsung ke lapangan dengan lebih banyak berdiskusi langsung dengan warga, menyapa warga dari satu kampung ke kampung lain. Sehingga, warga di pelosok pun akhirnya dapat berjumpa langsung dengan calon pemimpinnya.

Jika di tingkat nasional kampanye melalui media sosial sekarang menjadi tren untuk memobilisasi massa, di daerah Lampung penggunaan media sosial di kalangan calon masih sangat terbatas. Hal yang membuat lembaga pemenangan Arinal-Chusnunia jauh lebih memilih terjun langsung ke lapangan. Namun, kampanye media sosial ini tetap dilakukan dan terlihat cukup masif, walaupun hal tersebut hanya meng-*cover* kurang dari 10% dari total intensitas kampanye yang dilakukan. Hal ini didasari juga bahwa hanya ada 14% pemilih di wilayah Lampung yang menggunakan *smartphone*.

Dalam penerapan kampanye melalui komunikasi langsung ini, pasangan Arinal-Chusnunia terlihat sangat piawai. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian komunikasi yang cukup apik dan mengedepankan bahasa yang sopan dan tidak pernah melakukan *black campaign* dengan menjelekkkan kandidat lainnya, bahkan terhadap bupati petahana sekalipun. Komunikasi efektif yang ditunjukkan Nunik lebih menonjolkan pada promosi dan adu visi misi, serta program untuk membangun Provinsi Lampung di masa depan.

Konsistensi dan efektivitas komunikasi Chusnunia diterapkan juga oleh tim suksesnya di berbagai wilayah di Lampung. Dengan fokus pada promosi program dan penguatan karakter perempuannya, metode kampanye ini justru jauh lebih efektif dan mengena dalam pikiran masyarakat Lampung. Selain itu, ia diuntungkan juga sebagai kandidat perempuan satu-satunya di pemilihan pimpinan provinsi Lampung, sehingga publik yang awam lebih mudah untuk mengingat figuritasnya. Terutama, tim pemenangan tidak ragu-ragu dalam mengangkat objek keperempuanan Nunik. Walau sempat diterpa isu miring terkait dengan anak adopsi dan statusnya yang belum menikah, ketegasan Nunik dan ketenangannya dalam melakukan konfirmasi kepada publik, membuat masyarakat jauh lebih percaya pada apa yang ia sampaikan daripada gosip yang menerpanya.

Di samping konsistensi dan kerja keras tim pemenangan dalam membantu pasangan nomor tiga mendulang suara penuh di pilkada Lampung, hal lain yang berjalan sesuai rencana adalah penyusunan prioritas program dalam kampanye yang dilakukan oleh Arinal dan Chusnunia. Dengan mempertimbangkan profil demografi masyarakat Lampung yang bermatapencarian petani, pedagang, dan nelayan. Kubu nomor urut tiga ini banyak memprioritaskan untuk mengenalkan program pro rakyat miskin dengan latar belakang profesi tersebut. Bahkan dalam wawancara tim peneliti dengan tim sukses dari Golkar, contoh kartu petani juga ditunjukkan kepada kami untuk memvalidasi bahwa mereka sangat serius dalam mengenalkan program pemberdayaan petani dan dua profesi tadi di wilayah Lampung.

Prioritas program kampanye yang disusun Arinal-Chusnunia juga tidak sebatas itu saja. Dalam pergerakan dan kampanyenya, program pemberdayaan perempuan dan anak juga masuk sebagai program unggulan. Hal ini didasari oleh kondisi perempuan dan anak

di Lampung masih belum sepenuhnya sejahtera, sehingga program kerja yang disusun pun akan dijalankan untuk membantu perempuan dan anak hidup dengan kondisi layak.

#### **4.3.3 Signifikansi**

Merujuk pada strategi yang diterapkan untuk memenangkan pasangan Arinal-Chusnunia, signifikansi yang mengarah pada keberhasilan strategi, terbagi menjadi dua jenis:

##### **1) Penguatan identitas pemimpin perempuan**

Dengan menjadi satu-satunya politisi perempuan dalam kontestasi pemilihan pemimpin di Provinsi Lampung, figur Chusnunia jauh lebih mudah diingat oleh konstituen. Hal ini ditambah dengan keunggulannya dalam melakukan komunikasi politik saat kampanye yang berdampak positif pada citra politiknya. Kematangan Chusnunia sebelum menjalani kampanye di pemilihan gubernur-wakil gubernur Lampung sebenarnya teruji lebih dahulu di pemilukada Lampung Timur tahun 2015. Pada saat itu, ia dapat memanfaatkan dua faktor lingkungan fisik (personal dan geografis) untuk mendulang suara terbanyak dan kemudian terpilih sebagai pemimpin nomor satu di Kabupaten Lampung Timur. Untuk tahun 2018 sendiri, kedua faktor tersebut juga masih berperan signifikan dalam keterpilihan Nunik atau Chusnunia. Dalam wawancara dengan perwakilan anggota KPU Provinsi Lampung, disebutkan bahwa keunggulan personanya terbukti efektif dalam menaikkan elektabilitas:

Sebenarnya tipe pemilih di Provinsi Lampung masih tergolong tradisional, emosional. Belum masuk kategori rasional, yang merujuk pada program kerja. Ketika saya tanya langsung ke masyarakat kenapa milih si ibu ini atau

figure perempuan ini dalam pemilihan, jawaban mereka sederhana saja: '*wonge ayu*' (orangnya cantik). Jadi, preferensi personal masih mendominasi bagaimana masyarakat memilih calon pemimpinnya. Makanya bila ditanya program kerja yang diusung oleh kandidat yang mereka dukung, biasanya mereka akan menjawab tidak tahu.

Kelebihan fisik yang dimiliki oleh Chusnunia sendiri memang disadari oleh lembaga pemenangan, meski dari awal penjaringan calon, tingkat elektabilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan calon lain, yang kemudian semakin menambah kepercayaan diri partai dan tim sukses untuk meminangnya maju mendampingi Arinal.

## **2) Keterikatan emosional dan jaringan sosial**

Di samping keunggulan fisik yang menjadi poin plus, faktor sosio-kultural juga berperan penting. Sebagai politisi cerdas, sejak awal terjun ke dunia politik Kabupaten Lampung Timur, Chusnunia sudah menggaet tokoh adat lokal sebagai tim sukses. Hal yang sama juga ia terapkan ketika melakukan kampanye di tingkat provinsi. Beberapa tokoh adat dan pengusaha Lampung (termasuk *Sugar Group Company*) ia gandeng untuk memuluskan jalannya menjadi pemimpin terpilih. Hubungan dekatnya dengan tokoh-tokoh adat, membuat Chusnunia jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama oleh warga di pelosok-pelosok desa. Belum lagi, ia juga merupakan keturunan ulama besar yang disegani di Provinsi Lampung. Dengan kombinasi figuritas sang ayah dan jaringan sosial yang kuat, Nunik dan tim sukses berhasil memanfaatkan keunggulan ini dengan cemerlang. Hal ini didasari bahwa penduduk Lampung sekarang didominasi oleh imigran atau pendatang dari Jawa yang persentasenya melebihi 60%

dari total penduduk. Jumlah kepadatan penduduk sendiri terkonsentrasi di beberapa wilayah kantong suara, sehingga tidak heran bila dominasi pendatang dari Jawa dengan keterikatan emosional dan kultural yang kuat kemudian cenderung berpihak pada Chusnunia.

Di sisi lain, cakupan wilayah kampanye luas berdampak pada biaya politik yang tinggi. Untuk itu, lobi-lobi politik tim sukses kemudian banyak melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki modal capital tinggi untuk membiayai dana kampanye besar yang mereka keluarkan, termasuk dengan mendatangkan beberapa tokoh dari ibukota untuk mendatangkan dan menarik simpati massa. Kedua elemen inilah kemudian yang berhasil mengangkat perolehan suaranya pada pilkada serentak lalu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagai daerah yang lekat dengan budaya patriarkis, munculnya beberapa tokoh perempuan yang mewarnai dunia birokrasi di Lampung dalam sepuluh tahun terakhir ini merupakan sinyal positif bahwa situasi politik gender disini dapat dikatakan kondusif. Bahkan setelah Chusnunia terpilih dan berprestasi di Lampung Timur, ia kembali diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menduduki jabatan wakil gubernur.

Keberhasilan Chusnunia dalam membangun kepercayaan politik dari masyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai faktor penting yang melatarbelakanginya. Ditilik dari strategi yang dijalankan, baik itu sebelum masa kampanye dan selama masa kampanye. Aspek-aspek signifikan yang membuat figur Chusnunia atau Nunik dapat diterima antara lain: kemampuan komunikasi politik yang efektif (termasuk pelaksana strategi kampanye yang berdaya juang tinggi dan menjalankan peran masing-masing secara efektif dan efisien), jaringan sosial dan loyalitas massa yang kuat, serta penyusunan prioritas target/sasaran kampanye yang tepat.

Kemenangan Chusnunia dalam kontestasi politik serentak di Provinsi Lampung, selain menjadi tonggak sejarah baru dalam perpolitikan gender lokal, juga memicu tokoh-tokoh perempuan lain untuk berkecimpung di dunia politik, meski sejauh ini sebagian besar dari mereka hanya terbatas dari kalangan elit, atau lahir dari dinasti politik.

## **5.2 S a r a n**

Untuk menjaga situasi politik gender di wilayah Lampung agar tetap stabil, diperlukan beberapa cara antara lain:

- 1) Mendorong tokoh-tokoh perempuan lain yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk duduk di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif;
- 2) Untuk meningkatkan kemampuan personal dari tiap kader perempuan, pemerintah daerah perlu menjalankan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar keterpilihan kaum perempuan di ranah pilkada tidak hanya sekadar karena keunggulan fisik semata; dan
- 3) Partai politik harus lebih serius dalam melakukan kaderisasi internal terutama dalam perekrutan dan pengembangan diri para kader perempuan agar mereka memiliki kesempatan yang lebih seimbang untuk terjun dalam kontestasi politik dan mengabdikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Astrid Anugrah (2009) , Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 4.
- Cantor, Dorothy dan Toni Bernay. 1992. Women in Power: Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Craske, Nikki. 1999. Women & Politics in America Latin. United States : Rutgers University Press
- Crowder-Meyer, Melody. 2013. Gendered recruitment without trying: How local party recruiters affect women's representation. *Politics & Gender* 9:390–413.
- Dian Farricha, Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi, (Malang: Bayumedia Publising, 2010), hlm. 25.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 2018. Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung 2018. Bandar Lampung: DPPP Prov. Lampung.
- Eriyanto, 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS
- Fieske, John, 1987. Television Culture. London and New York: Routledge
- Hardy-Fanta, Carol, Pei-te Lien, Dianne Pinderhughes, and Christine Marie Sierra. 2016. Contested Transformation. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Komariyah, Nur (2017) Gerakan Perempuan Partai Politik : Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan oleh Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- L. Rintis Susanti, Perempuan dan Politik, *Jurnal Studi Politik* Vol'1 No.2 Tahun 2011, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

- Latifah Iskandar, 2008, 'Peran Perempuan Parlemen', dalam Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008
- Nielsen, Sigge Winther. 2011. Three Faces of Political Marketing Strategy. *Journal of Public Affairs*. DOI: 10.1002/pa.434
- Partini, 2004. 'Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol, 7, No 3, Maret 2004: 315-334
- Partini. Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.2 , November 2012
- Rasyidin dan Fidhia Aruni. 2019. Gender Dan Politik: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.
- Smith, Adrienne, Beth Reingold, and Michael Leo Owens. 2011. The political determinants of women's descriptive representation in cities. *Political Research Quarterly* 64:315–29.
- Utami, Tari Siwi. 2001. Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001. Yogyakarta : Gama Media

## **B. Internet**

- "The Global Gender Gap Report 2018", the World Economic Forum, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2018.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf), (30 Januari 2019).
- "Bagaimana Skor Indonesia di Indeks Kesetaraan Gender 2018?", DW, <https://www.dw.com/id/bagaimana-skor-indonesia-di-indeks-kesetaraan-gender-2018/a-45552865>, (30 Januari 2019).
- Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", <https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>, (30 Januari 2019).

- “Partisipasi Politik Perempuan Rendah”,  
<https://kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4898/Partisipasi-Politik-Perempuan-Rendah>, (31 Januari 2019).
- Ana Yunita Pratiwi, “Perempuan dalam Politik”,  
<http://www.lampost.co/berita-perempuan-dalam-politik.html>, (31 Januari 2019)
- Ana Maria G. D. dan M. A. Liza Q., “Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak”,  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27052>, (31 Januari 2019)
- “Status Gadis Chusnunia Jadi Bahasan Netizen”,  
<https://be1lampung.com/headlines/status-gadis-nunik-daftar-pilgub-jadi-bahasan-nitzen>, (31 Januari 2019).
- “Ketua Komnas Anak: Jangan Eksploitasi Anak untuk Mendemo Bupati Lampung Timur”, <http://lampung.tribunnews.com/2017/08/08/ketua-komnas-anak-jangan-eksploitasi-anak-untuk-mendemo-bupati-lampung-timur>, (01 Februari 2019).
- Cassese, E.C. & Holman, Party and Gender Stereotypes in Campaign Attacks, *M.R. Polit Behav* (2018) 40: 785.  
<https://doi.org/10.1007/s11109-017-9423-7>.
- Antara, Pilkada Lampung, KPU Tetapkan Arinal-Nunik Gubernur dan Wagub, <https://nasional.tempo.co/read/1116286/pilkada-lampung-kpu-tetapkan-arinal-nunik-gubernur-dan-wagub>, (02 Februari 2019).
- Ayomi Amindoni, “Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018 Naik, Keberpihakan pada Agenda dan Isu Perempuan masih Rendah”,  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445>, (02 Februari 2019).
- Gustiana A. Kambo, 2017, “Penguatan Identitas Perempuan dalam Kepala Daerah”, *the Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin* Vol. 3 No. 1,

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3807/pdf>.

Agus R. P. dan Doddy Setiawan, 2017, "Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak terhadap Kinerja Pemerintahan?", Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 8 No. 3 hal. 427-611, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/759>.

<http://www.suaralampung.com/2017/07/unjuk-rasa-hiasi-pemda-lampung-timur.html>

<http://newslampungterkini.com/news/11320/ratusan-warga-datangi-pemkab-pertanyakan-status-anak-angkat-bupati-lamtim.html>

<http://www.suarapedia.com/detail/berita/2423/status-anak-angkat-bupati-lampung-timur-dipertanyakannbsp>

<https://newslampungterkini.com/news/11325/sekdakab-lamtim-syahrudin-aj-anak-adopsi-chusnunia-chalim.html>

<https://www.suara.com/news/2017/07/23/131505/chusnunia-chalim-sedih-adopsi-anak-malah-didemo-ormas>

<https://suryaandalas.co.id/2017/07/24/buntut-aksi-lp3ri-lampung-timur/>

## Lampiran 1

### Garis Besar Hasil Wawancara

#### 1. Pakar Politik Pemerintahan di Universitas Lampung

- Di beberapa tahun terakhir, beberapa politisi perempuan sudah mulai mengisi posisi pimpinan di ranah eksekutif dan legislatif. Secara umum, terdapat kenaikan partisipasi politik langsung perempuan.
- Politisi perempuan yang terbanyak berasal dari PDI-P dan Golkar
- Selain itu, sebagian besar calon dan politisi perempuan berasal dari dinasti politik/memiliki relasi dengan politisi lainnya, misalnya istri bupati/walikota, istri ketua partai politik
- Pengkaderan kandidat perempuan di lingkup internal partai belum berjalan secara maksimal, rekrutmen berjalan tidak terstruktur, merekrut tokoh-tokoh yang tingkat keterkenalannya cukup tinggi di wilayah.
- Populasi asli Lampung sedikit. Paling besar berasal dari Jawa, sehingga secara geografis lebih banyak mengarah ke budaya Jawa. Dan itu mempengaruhi budaya politik, tingkah laku bermasyarakat.
- Lampung mengarah ke budaya patriarki, namun di daerah pedesaan justru yang lebih giat bekerja adalah kaum perempuan
- Kekuatan profil pasangan, dukungan perusahaan besar (Sugar Group Company), preferensi personal dan modal politik secara finansial berperan penting dalam kemenangan politisi
- *High cost* untuk mendukung kandidat yang maju lebih dipilih untuk menjaga jarak dekat dengan birokrasi/pemerintah

- Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi varian-varian pemilih yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung: lingkup pemahaman politik dan demokrasi masih sangat terbatas.
- Strategi memenangkan wilayah dengan populasi banyak dan juga menguatkan koneksi dengan pimpinan di tiap kabupaten/kota
- Salah satunya kunci kemenangan dari politisi perempuan yang berkiprah di Lampung adalah jaringan sosial yang luas, bahkan wagub terpilih dan saudara perempuannya berhasil terpilih. Sedangkan politik identitas kurang berlaku (terutama karena daerah Lampung yang heterogen), namun politik uang masih marak.
- Kenaikan jumlah politisi perempuan di legislatif, dari 12 menjadi 17 (dari total 85 anggota).
- Wagub yang terpilih memiliki irisan profil yang cukup menonjol. Identifikasi pemilih: Jawa, Islam, Ormas NU, kaum Millennial.

## 2. Bawaslu Lampung

- Seharusnya ada 4 pasang calon, namun akhirnya satu calon gugur karena terjerat oleh kasus korupsi
- Latar belakang kandidat, sebagian besar dari birokrasi (petahana gubernur, bupati, dan walikota) dan pengusaha
- Ada beberapa laporan pelanggaran terkait pelanggaran ketika kampanye, seperti politik uang. Namun, ketika diproses lebih lanjut, terdapat kesulitan dalam pembuktian dan kehadiran saksi
- Kekuatan pasangan terpilih: mampu memanfaatkan media sosial, basis jaringan sosialnya cukup luas, mewakili generasi muda/millennial.

- *Black campaign* hanya di awal karena ada kemungkinan bahwa strategi tersebut tidak efektif untuk menaikkan suara secara signifikan
- Para kandidat banyak memanfaatkan kegiatan sosial masyarakat untuk menarik simpati warga
- Politik uang masih banyak terjadi, namun bervariasi tergantung kondisi wilayah. Sayangnya, jarang dilaporkan karena masyarakat juga diuntungkan oleh situasi ini. Bahkan ada 'dana kampanye tersembunyi' ke masjid dan kelompok-kelompok pengajian. Dari Bawaslu sendiri akan menindaklanjuti bila ada laporan dari masyarakat, tapi sebagian besar kasusnya sering kadaluarsa karena tidak ada tindak lanjut dari pelapor dan saksi-saksi. Selain itu penafsiran peraturan KPU sangat tergantung oleh KPU masing-masing daerah.
- Strategi kampanye dilakukan waktu reses, namun tidak terdapat laporan dari masyarakat karena dimungkinkan masyarakat juga menikmati 'insentif' yang diberikan oleh kandidat
- Pasangan terpilih mengandalkan wilayah yang menjadi basis NU (termasuk Lampung Timur), dimana promosi juga lancar digencarkan.
- Isu gender sendiri bukan suatu hal yang dipertentangkan oleh masyarakat, masyarakat lebih melihat kinerjanya, terlebih sekarang ini dengan munculnya banyak politisi perempuan. Dari calon walikota hingga bupati di beberapa daerah.
- Strategi para kandidat bahkan jauh-jauh hari sebelum kampanye. Misalnya waktu reses ada petahana yang memanfaatkan untuk mencuri kesempatan memberikan donasi kepada warga, seperti jilbab, sumbangan uang, dll.

- Kampanye melalui akun resmi kantor juga dilarang, tapi jika dilakukan oleh akun pribadi tidak dipermasalahkan.
- Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi: politik uang dan permasalahan netralitas ASN. Namun kedua hal ini pembuktiannya agak susah (seluruh faktor harus terpenuhi: sistematis, terstruktur, dsb)

### 3. KPUD Provinsi Lampung

- Secara umum, pilgub berjalan dengan lancar, tidak ada tensi tinggi.
- Beberapa pelanggaran politik uang terjadi di pilgub Kabupaten Tanggamus (calon nomor urut 3), tapi sebagian besar kadaluarsa. Hanya satu kasus yang pelakunya kemudian dikenai hukuman.
- Elit politik masih di posisi aman bila terjadi pelanggaran pilkada dan pilgub, yang terjerat hanya dari masyarakat. Pengusaha juga memiliki kepentingan besar dengan mendonasikan dana kampanye untuk seluruh calon.
- Sosialisasi KPU sudah digencarkan untuk menolak politik uang, tetapi sulit dihapuskan di kalangan masyarakat. Hal ini juga terhalang oleh kebiasaan/budaya '*sungkan*' (merasa tidak enak bila menolak pemberian tim kampanye). Selain itu, kandidat juga bermain strategi dengan tidak memberikan uang, tapi hal lain seperti minyak, gula, dsb.
- Hambatan politik gender karena karakteristik pemilih tradisional, tidak karena gender atau visi misi. Kecenderungannya lebih karena penilaian subjektif (suka/tidak suka), dan juga dinasti politik yang masih kuat.

### 4. Tim Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (Lembaga Pemenangan Pemilu)

- Wagub terpilih merupakan bupati perempuan pertama di Lampung. Kecenderungan masyarakat sekarang yang jauh lebih menerima pemimpin perempuan.
- Di kalangan partai (secara internal), sudah dibahas jauh-jauh hari kader mana yang elektabilitasnya tinggi. Wagub terpilih memiliki modal sosial, profil personal, dan jaringan yang kuat.
- Sampai hari ini, organisasi keagamaan yang paling sering dilirik parpol di Lampung adalah NU. Dengan kedekatan PKB-NU, hal ini memungkinkan untuk
- Strategi kampanye *Canvassing/door to door* untuk mengenalkan pasangan yang diusung secara intens dan rutin kepada masyarakat selama masa kampanye. Selain itu mempromosikan 33 agenda kerja yang ditawarkan kepada publik.
- Tim sukses lebih memaksimalkan strategi *cost politik*, salah satunya dengan membantu menyediakan transportasi, makan dan minum ketika kampanye, dan lain-lain.
- Wagub terpilih mengandalkan program pemberdayaan petani, wirausaha, dan pemberdayaan perempuan.
- Adanya isu-isu personal yang digunakan untuk menyerang pribadi kandidat, tidak menggoyahkan kandidat. Pribadinya yang menanggapi dengan santai, tanpa emosi menjadikan pemilih/masyarakat malah kemudian simpatik.

- Keunggulan PKB mengusung wagub terpilih adalah sosok perempuan yang inspirasional, tingkat elektabilitas dari hasil survey cukup tinggi, banyak pengalaman, figuritas (anak kiai).
- PKB menjaring banyak tokoh, setelah dipertimbangkan hasilnya *scoringnya* untuk wagub terpilih adalah yang paling tinggi
- Seluruh kandidat memiliki kultur NU, tapi untuk struktur hanya wagub terpilih yang jaringannya paling kuat.
- PKB memiliki strategi untuk menaikkan kandidat-kandidat perempuan, termasuk anggota DPR, anggota DPRD,
- Secara finansial terbatas, sehingga untuk mendulang suara masyarakat. PKB memilih segmen pemilih perempuan dan ibu-ibu. Sehingga partai berusaha mengakomodir para kadernya dan juga mendekati golongan ini untuk memenangkan pemilihan. Dan hal ini bukan strategi yang baru saja diterapkan, tapi sudah sejak lama.
- Sumber pendanaan partai dari iuran anggota, iuran perseorangan/kelompok dan juga perusahaan.

#### 5. Tim Kampanye Partai Golkar

- Penjaringan nama-nama mengerucutkan wagub terpilih (nomor satu) yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan banyak prestasi, berpendidikan tinggi.
- Wagub terpilih memiliki jaringan sosial dan organisasional yang kuat, meski banyak pengalamannya di pusat, namun merupakan orang asli Lampung
- Budaya Lampung yang terbuka dengan kedatangan orang luar, dan juga menerima figur pemimpin perempuan menjadikan wagub terpilih mendapatkan sambutan bagus.

- Figur wagub yang terbuka dalam menanggapi isu-isu personal yang menyerang beliau. Gayanya yang santai juga menjadi nilai plus untuk pengusungan beliau dalam kontestasi gubernur.
- Untuk pengajuan kembali ke periode masih akan didiskusikan kembali nantinya. Untuk pemilihan wagub sendiri diserahkan seluruhnya ke partai.
- Kerjasama kampanye dikolaborasikan antar partai koalisi (Golkar, PKB, PAN). Kampanye juga dilakukan secara intens bersama ustadz Solmed dan Via Vallen (disewa sebagai juru kampanye) di beberapa titik.
- Pemanfaatan media sosial tidak terlalu intens, lebih cenderung kampanye langsung ke lapangan (karena hanya 14% yang menggunakan *smartphone*). Semakin sering intensitas pertemuan kandidat, lebih mengena profil kandidat ke pemilih.
- Program unggulan untuk petani dengan kartu tani berjaya. Selain juga program untuk pemberdayaan perempuan, melalui pengajian-pengajian.
- Belum adanya kaderisasi internal yang kuat. Sehingga calon-calon hanya berasal dari kalangan elit/dinasti politik.
- Budaya Lampung sendiri semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan terutama di sepuluh tahun terakhir.